

**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di
Provinsi Jawa Timur Tahun 2018**

Oleh:
FARAH NUR AFIFAH



PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2021

**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di
Provinsi Jawa Timur Tahun 2018**

Oleh:

FARAH NUR AFIFAH



**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Pertanian Strata Satu (S-1)**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
MALANG
2021**

LEMBAR PERNYATAAN**LEMBAR PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018” belum pernah diajukan pada perguruan tinggi lain atau lembaga manapun untuk memperoleh gelar akademik. Saya juga menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat benar-benar hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan saya sendiri dengan bimbingan komisi pembimbing. Skripsi ini tidak mencantumkan yang sudah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali sebagai bahan rujukan dalam skripsi yang dengan jelas ditunjukkan rujukannya dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, 01 Juli 2021

Farah Nur Afifah

NIM. 175040101111058

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan
Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018
Nama Mahasiswa : Farah Nur Afifah
NIM : 175040101111058
Jurusan : Sosial Ekonomi Pertanian
Program studi : Agribisnis

Disetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Sujarwo, SP., MP.
NIP. 197806032005011019



Rini Mutisari, SP., MP.
NIP. 2016099005052001

Mengetahui,

Ketua

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian



Hery Toiba, SP., MP., Ph.D.
NIP. 197209082003121001

Tanggal persetujuan : 29 Januari 2021

LEMBAR PENGESAHAN

Mengesahkan
MAJELIS PENGUJI

Penguji I



Putri Budi Setyowati, SP., M.Sc.
NIP. 2016079003312001

Penguji II,



Rini Mutisari, SP., MP.
NIP. 2016099005052001

Penguji III,



Dr. Sujarwo, SP., MP.
NIP. 197806032005011019

Tanggal lulus: 28 Juli 2021



RINGKASAN

FARAH NUR AFIFAH. 17504010111058. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Di bawah bimbingan Dr.Sujarwo, SP., MP. selaku pembimbing utama dan Rini Mutisari, SP., MP. selaku pembimbing pendamping.

Pembangunan ekonomi regional digambarkan oleh pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode. Jawa Timur merupakan area dengan pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi selama periode 2016-2018. Permasalahan yang biasa terjadi pada pertumbuhan ekonomi adalah masalah sosial dan kependudukan. Permasalahan ini seringkali disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pembangunan ekonomi yang berfluktuasi dan tidak merata pada suatu wilayah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, persentase penduduk miskin, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui pengaruh status wilayah yaitu wilayah kabupaten dan wilayah kota sebagai variabel *dummy* terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data *cross-section* dengan sampel sebanyak 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2018. Metode analisis berupa fungsi regresi linear berganda dengan variabel *dummy* menggunakan alat analisis program STATA. Variabel *dummy* yang digunakan berupa status wilayah untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten dan wilayah kota Provinsi Jawa Timur.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu variabel pertumbuhan penduduk dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel persentase penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tahun 2018. Selain itu variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan status wilayah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu wilayah kota dan kabupaten cenderung memiliki perbedaan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,073 persen tetapi secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, IPM, Persentase Penduduk Miskin, TPAK, Status Wilayah

SUMMARY

FARAH NUR AFIFAH. 175040101111058. Analysis of Factors Affecting Economic Growth in East Java Province in 2018. Under the guidance of Dr.Sujarwo, SP., MP. as the main supervisor and Rini Mutisari, SP., MP. as a co-supervisor.

Regional economic development is described by the economic growth of a region in a period. East Java is an area with fluctuating economic growth during the 2016-2018 period. Problems that usually occur in economic growth are social and population problems. This problem is often caused by factors that affect economic growth. This condition causes fluctuating and uneven economic development in an area.

This study aims to analyze the effect of economic growth factors, namely population growth, human development index, percentage of poor people, and labor participation rate on economic growth in East Java. This study also aims to determine the effect of regional status, namely the district and city areas as a dummy variable on economic growth in East Java. The data used in this study is cross-sectional data with a sample of 38 districts/cities in East Java in 2018. The analysis method is in the form of multiple linear regression functions with dummy variables using the STATA program analysis tool. The dummy variable used is in the form of regional status to determine differences in economic growth in the district and city areas of East Java Province.

The results obtained from this study are the variable population growth and the Labor Force Participation Rate (TPAK) have a positive and significant effect, while the variable percentage of the poor population has a negative and significant effect on economic growth in East Java in 2018. In addition, the variable Human Development Index (IPM) and the status of the region has a positive and insignificant effect on economic growth. In addition, cities and districts tend to have differences in economic growth of 0.073 percent but statistically it has no significant effect on economic growth.

Keywords: Economic Growth, Population Growth, HDI, Percentage of Poor Population, Labor Force Participation Rate, Regional Type

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN i

SUMMARY ii

KATA PENGANTAR iii

RIWAYAT HIDUP iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

I. PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Rumusan Masalah 9

 1.3 Batasan Masalah 13

 1.4 Tujuan Penelitian 13

 1.5 Kegunaan Penelitian 13

II. TINJAUAN PUSTAKA 15

 2.1 Penelitian Terdahulu 15

 2.2 Teori 19

III. KERANGA TEORITIS 34

 3.1 Kerangka Pemikiran 34

 3.2 Hipotesis 37

 3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 38

IV. METODE PENELITIAN 41

 4.1 Pendekatan Penelitian 41

 4.2 Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian 41

 4.3 Teknik Penentuan Sampel 41

 4.4 Teknik Pengumpulan Data 42

 4.5 Teknik Analisis Data 42

 4.6 Pengujian Hipotesis 44

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 46

 5.1 Gambaran Umum 46



5.2 Statistika Deskriptif..... 56

5.3 Uji Asumsi Klasik..... 58

5.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda..... 59

5.5 Pengujian Hipotesis..... 60

5.6 Pembahasan Hasil Penelitian..... 62

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 69

6.1 Kesimpulan..... 69

6.2 Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA 71



DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....		39
2. Sumber Pengumpulan Data Penelitian.....		42
3. Kategori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Laju PDRB Atas Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2018 (Persen)		47
4. Kategori IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013- 2018.....		50
5. Pengelompokan wilayah Jawa Timur Berdasarkan Perkembangan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi periode 2008-2013		50
6. Pengelompokan wilayah Jawa Timur Berdasarkan Perkembangan Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi.....		52
7. Angkatan Kerja Menurut Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2018 (Jiwa).....		53
8. TPAK dan TPT menurut Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2018 (Persen)		54
9. Statistic Descriptive		56
10. Shapiro-Wilk W Test		58
11. <i>Multikolinearity Statistic</i>		58
12. Breush-Pagan Test		59
13. Hasil Uji Linear Berganda		59
14. Hasil F-Test.....		60



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Teks	Halaman
1.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dan Indonesia tahun 2016-2018 Menurut Harga Konstan 2010 (Persen).....	2
2.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dan Indonesia tahun 2016-2018 (Persen).....	4
3.	IPM Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dan IPM Indonesia tahun 2016-2018.....	7
4.	Perubahan Titik Steady State Perekonomian dalam Pertumbuhan Neoklasik..	24
5.	Lingkar Kemiskinan Baldwin dan Meier.....	31
6.	Kerangka Pemikiran.....	37
7.	<i>Dummy</i> Intersep.....	43
8.	Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi di Indonesia.....	46
9.	PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Milliar rupiah).....	48
10.	Jumlah Penduduk Jawa Timur tahun 2013-2017.....	49
11.	Perbandingan Struktur PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018.....	55
12.	Kesenjangan ekonomi Jawa Timur tahun 2009-2013.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Teks	Halaman
1. Data Penelitian Tahun 2018		76
2. Hasil Regresi Berganda dengan Variabel <i>Dummy</i>		78
3. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2018 (Persen)		79
4. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2018 (Persen)		80
5. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018		81
6. Kategori IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017		82
7. PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Milliar rupiah)		83
8. Perbandingan Struktur PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018		84

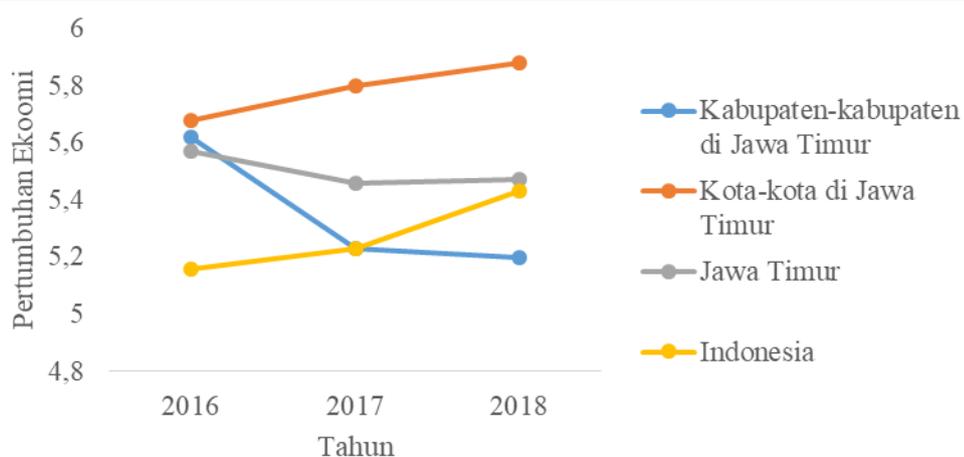


I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dalam perekonomian untuk mengembangkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur yang tersedia menjadi lebih banyak dan berkembang (Sukirno, 2012). Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu GNP atau GDP, struktur ekonomi, *Human Development Index* (HDI), dan *Physical Quality of Life Index* (PQLSI) (Chendrawan, 2017). Pembangunan ekonomi dalam lingkup nasional diukur berdasarkan GDP tetapi pembangunan ekonomi dalam lingkup regional dapat diukur melalui tinggi atau rendah pertumbuhan ekonomi regional (Tyas et al, 2015). Keberhasilan pembangunan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat memerlukan nilai pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan merata sehingga tidak menciptakan ketimpangan pendapatan pada suatu wilayah (Putri, 2017).

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai proses perbaikan sistem kelembagaan sehingga berdampak pada kenaikan pendapatan yang terjadi secara teru-menerus (Asnidar, 2018). Indikator yang sering dijadikan alat ukur pertumbuhan ekonomi adalah PDRB atas harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan merupakan nilai untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari nilai bersih barang dan jasa atas harga dasar yang berlaku pada suatu wilayah. Provinsi Jawa Timur salah satu daerah yang memiliki wilayah luas dan terus berupaya meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi. Nilai pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dari tahun 2016-2018 berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Nilai pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) *rill* yang ditunjukkan oleh Gambar 1 sebagai berikut:



Sumber: BPS data diolah

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dan Indonesia Tahun 2016-2018 Menurut Harga Konstan 2010 (Persen)

Gambar 1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dari sisi pengeluaran tahun 2016-2018 memiliki tren yang berfluktuasi meskipun nilai pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2016 sebesar 5,57 persen kemudian mengalami penurunan menjadi 5,46 persen di tahun 2017. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,47 persen pada tahun 2018. Permasalahan yang sedang terjadi di Provinsi Jawa Timur adalah nilai pertumbuhan ekonomi tahun 2018 masih belum memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur yang ditetapkan sebesar 5,61-5,96 persen (Ludiro, 2019).

Pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi dari tahun 2016-2018 masih belum menciptakan pemerataan pendapatan. Kondisi ini ditunjukkan oleh rata-rata pertumbuhan ekonomi pada wilayah kabupaten Jawa Timur memiliki tren yang menurun, dimana pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten Jawa Timur tahun 2016 sebesar 5,62 persen kemudian mengalami penurunan menjadi 5,23 persen di tahun 2017. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi menjadi 5,2 persen pada tahun 2018. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada wilayah kota Jawa Timur memiliki tren yang meningkat di tahun 2016-2018. Pertumbuhan ekonomi wilayah kota Jawa Timur tahun 2016 sebesar 5,68 persen kemudian mengalami peningkatan menjadi 5,8 persen di tahun 2017. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi wilayah kota menjadi 5,88 persen pada tahun 2018. Perbedaan pertumbuhan ekonomi

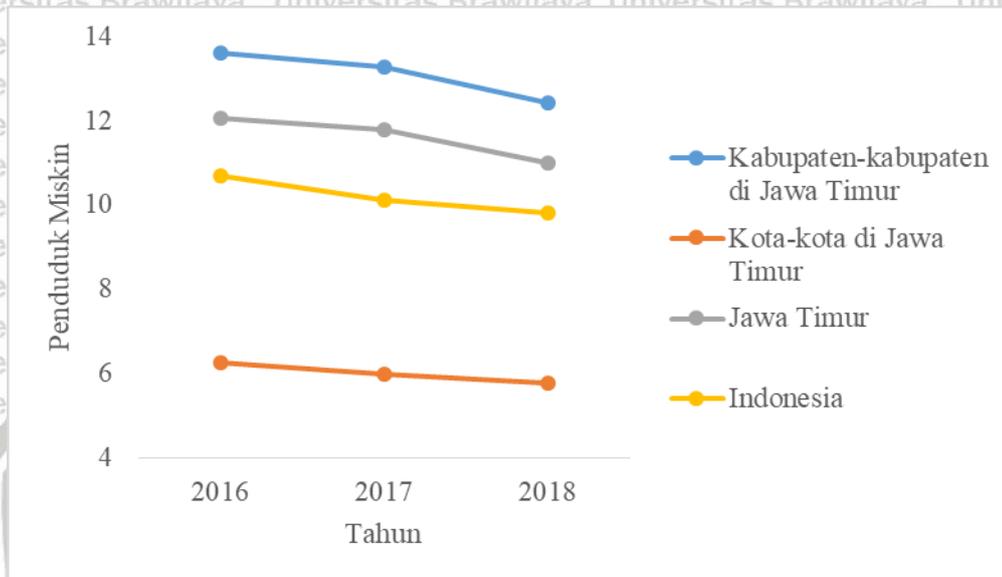
antara wilayah kota dan wilayah kabupaten disebabkan oleh 60 persen wilayah kabupaten/kota Jawa Timur masih memiliki nilai PDRB di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur (5,5%) mulai tahun 2016 hingga 2018.

Perbedaan nilai pertumbuhan ekonomi juga disebabkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut Jhingan (2010) beberapa faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, sumberdaya alam, dan teknologi. Menurut BPS (2019) Provinsi Jawa Timur menempati peringkat kedua dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia. Untuk mengetahui penambahan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dalam data BPS tahun 2016 jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur berjumlah 39.075.152 jiwa, sedangkan tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 39.292.971 jiwa. Selanjutnya tahun 2018 jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur menjadi 39.500.851 jiwa. Data jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur menunjukkan jumlah penduduk yang meningkat pada tahun 2016 sampai 2018. Jumlah penduduk yang terus bertambah akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang mengalami peningkatan terus menerus akibat dari penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikemukakan oleh Handayani et al., (2016) pada penelitiannya yang menemukan bahwa penambahan jumlah penduduk membuat pertumbuhan penduduk meningkat seringkali menjadi beban dalam pembangunan ekonomi daerah. Penambahan jumlah penduduk apabila tidak diimbangi penambahan lapangan pekerjaan akan menyebabkan tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan (Sukirno, 2006). Penduduk yang tidak bekerja akan menambah daftar pengangguran sehingga masyarakat tidak memiliki pendapatan yang cukup. Rendahnya pendapatan masyarakat membuat individu sulit mencukupi kebutuhan pangan dan non pangan sehingga masyarakat masuk ke dalam lingkaran kemiskinan. Keadaan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk berhubungan dengan kemiskinan dalam mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata. Mopangga (2010) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi yang berhasil dapat dilihat dari aspek sosial budaya,

hukum, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan ekonomi dilihat dari aspek pengentasan kemiskinan tentunya tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan.

Masalah kemiskinan memunculkan penduduk miskin yang dapat menjadi tantangan dalam pertumbuhan ekonomi. Data persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Timur dan Indonesia dapat dijelaskan pada Gambar 2 sebagai berikut.



Sumber: BPS data diolah

Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dan Indonesia tahun 2016-2018 (Persen)

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan angka kemiskinan di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun tetapi angka kemiskinan di Jawa Timur masih berada di atas kemiskinan Indonesia. Kondisi ini merujuk pada tingkat kemiskinan Jawa Timur masih cukup tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Kondisi ini ditunjukkan oleh persentase penduduk miskin Jawa Timur tahun 2016 sebesar 12,05 persen kemudian mengalami peningkatan menjadi 11,77 persen di tahun 2017. Selanjutnya persentase penduduk miskin menjadi 10,98 persen pada tahun 2018. Sedangkan persentase penduduk miskin Indonesia tahun 2016 sebesar 10,70 persen kemudian mengalami penurunan menjadi 10,12 persen di tahun 2017. Selanjutnya persentase penduduk miskin Indonesia menjadi 9,82 persen pada tahun 2018.

Gambar 2 menunjukkan wilayah kabupaten Jawa Timur memiliki penduduk miskin lebih banyak dibandingkan dengan wilayah kota Jawa Timur

pada tahun 2016-2018. Kondisi ini ditunjukkan oleh rata-rata persentase penduduk miskin pada wilayah kabupaten Jawa Timur memiliki tren yang menurun, dimana persentase penduduk miskin wilayah kabupaten Jawa Timur tahun 2016 sebesar 13,61 persen kemudian mengalami penurunan menjadi 5,28 persen di tahun 2017. Selanjutnya persentase penduduk miskin menjadi 12,43 persen pada tahun 2018. Rata-rata persentase penduduk miskin pada wilayah kota Jawa Timur memiliki tren yang menurun di tahun 2016-2018. Persentase penduduk miskin wilayah kota Jawa Timur tahun 2016 sebesar 6,27 persen kemudian mengalami penurunan menjadi 5,99 persen di tahun 2017. Selanjutnya persentase penduduk miskin wilayah kota menjadi 5,77 persen pada tahun 2018. Perbedaan penduduk miskin disebabkan oleh fluktuasi presentase penduduk miskin pada sebagian wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan pada wilayah Kabupaten Nganjuk tahun 2016 persentase penduduk miskin sebesar 12,25% kemudian tahun 2017 naik menjadi 11,98%, dan tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 12,11%. Wilayah lainnya yang juga mengalami *fluktuasi* penduduk miskin adalah Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Lumajang.

Perbedaan persentase penduduk miskin dapat dilihat pada tahun 2018 wilayah kota memiliki rentang persentase penduduk miskin lebih rendah nilainya sebesar 3,89%-7,20% dibandingkan dengan nilai persentase penduduk miskin wilayah kabupaten dengan rentang sebesar 5,69%-21,21%. Perbedaan persentase penduduk miskin seringkali disebabkan oleh *fluktuasi* persentase penduduk miskin di Jawa Timur. Fluktuasi penduduk miskin akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Fenomena ini ditunjukkan oleh Gambar 1 dimana pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2016-2018 yang mengalami penurunan sebesar 0,11 persen pada tahun 2017 kemudian meningkat sebesar 0,01 persen di tahun 2018. Hal ini sejalan dengan persentase penduduk miskin yang masih mengalami *fluktuasi* pada 13,1 persen wilayah kabupaten/kota Jawa Timur periode 2016-2018. Lee dan Sison (2016) menemukan keterkaitan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi. Rumah tangga dianggap faktor penting untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Rumah tangga dalam kondisi miskin akan berdampak pada pengeluaran masyarakat yang terbatas dalam mengakses kebutuhan sehari-hari sehingga berdampak pada pendapatan ekonomi daerah.

Jumlah penduduk miskin juga didorong oleh pengangguran yang berasal dari pertumbuhan penduduk yang tidak dapat dikendalikan sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Penelitian Prayitno dan Renta (2020) menunjukkan hubungan negatif antara tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dimana tenaga kerja memegang peran penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Tenaga kerja yang terserap dalam lapangan pekerjaan tidak akan menciptakan pengangguran. Selain itu tenaga kerja memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga mengurangi ketimpangan distribusi pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu faktor kependudukan adalah jumlah penduduk yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja pada suatu wilayah. Tenaga kerja sebagai faktor produksi atau komponen penting yang dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk dalam usia kerja (15-60 tahun). TPAK merupakan faktor besaran *output* kegiatan ekonomi. Penelitian Maharani (2017) menemukan bahwa semakin banyak penduduk produktif atau penduduk yang bekerja maka akan menghasilkan *ouput* yang bertambah banyak.

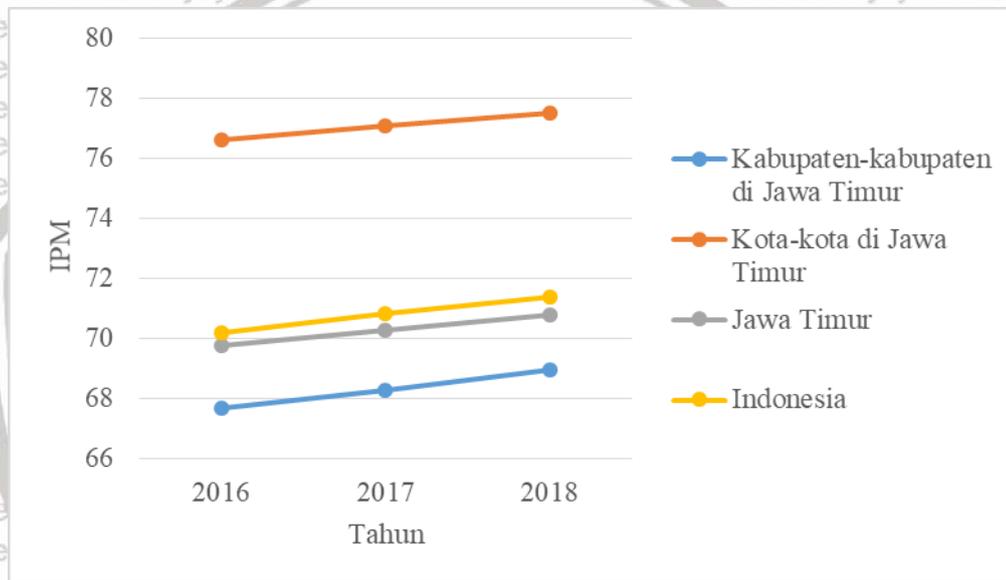
Jawa Timur memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengindikasikan besaran jumlah angkatan kerja yang bekerja semakin besar sehingga akan mendorong pengurangan angka kemiskinan. Untuk mengetahui ketersediaan angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dalam data BPS tahun 2016 Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 66,14 persen, sedangkan tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 68,78 persen. Selanjutnya tahun 2018 Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Timur menjadi 69,37 persen. Data Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Timur menunjukkan ketersediaan angkatan kerja yang meningkat pada tahun 2016 sampai 2018.

Peningkatan TPAK menandakan bahwa angkatan kerja yang terserap pada berbagai lapangan usaha mengalami penambahan dari tahun ke tahun. Todaro (1997) juga berpendapat bahwa semakin banyak penduduk maka tenaga kerja yang tersedia melimpah sehingga meningkatkan pasar domestik dengan didukung

tenaga kerja besar mampu menghasilkan barang dan jasa beragam serta didukung oleh daya beli masyarakat yang tinggi.

Keberhasilan pembangunan ekonomi yang ideal tidak hanya dari segi ekonomi melainkan sosial. Keberhasilan ini dapat diketahui melalui kualitas sumber daya manusia yang diukur menggunakan indeks pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam pembangunan ekonomi yang ditetapkan dalam tiga komponen yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah. Pencapaian IPM di Provinsi Jawa Timur dapat disajikan pada Gambar 3 berikut ini:



Sumber : BPS data diolah

Gambar 3. IPM Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dan IPM Indonesia tahun 2016-2018

Gambar 3 menunjukkan secara umum IPM di Provinsi Jawa Timur memiliki tren meningkat selama periode 2016 hingga 2018 dan rata-rata IPM Jawa Timur tahun 2016 berada pada kategori IPM sedang yaitu $70 < IPM < 60$ dan tahun 2017-2018 naik ke dalam kategori tinggi yaitu $80 > IPM > 70$. Pencapaian IPM Provinsi Jawa Timur masih di bawah nilai IPM nasional.

Kondisi ini ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur tahun 2016 sebesar 69,74 persen kemudian mengalami peningkatan menjadi 70,27 persen di tahun 2017. Selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) menjadi 70,77 persen pada tahun 2018. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2016 sebesar 70,18 persen kemudian mengalami peningkatan menjadi 70,81 persen di tahun 2017. Selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menjadi 71,39 persen pada tahun 2018.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur pada wilayah kota menunjukkan pembangunan manusia lebih baik dibandingkan wilayah kabupaten pada tahun 2016-2018. Kondisi ini ditunjukkan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada wilayah kabupaten Jawa Timur memiliki tren yang menurun, dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) wilayah kabupaten Jawa Timur tahun 2016 sebesar 67,67 persen kemudian mengalami peningkatan menjadi 68,26 persen di tahun 2017. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 68,94 persen pada tahun 2018. Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada wilayah kota Jawa Timur memiliki tren yang meningkat di tahun 2016-2018. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) wilayah kota Jawa Timur tahun 2016 sebesar 76,6 persen kemudian mengalami penurunan menjadi 77,06 persen di tahun 2017. Selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) wilayah kota menjadi 77,51 persen pada tahun 2018.

Perbedaan nilai pembangunan manusia wilayah kota dan wilayah kabupaten disebabkan oleh 62 persen wilayah kabupaten Jawa Timur tahun 2018 memiliki IPM di bawah rata-rata IPM Jawa Timur (70,77%), sedangkan wilayah kota-kota Jawa Timur nilai IPM lebih dari 70,77 persen. Penelitian Amaliah (2004) menemukan bahwa daerah perkotaan atau daerah yang memiliki potensi sumber daya memiliki infrastruktur yang lebih lengkap sehingga pembangunan manusia berjalan lebih baik. Nilai pembangunan manusia yang tinggi menandakan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi pula sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami *fluktuasi* pada periode 2016-2018 sehingga nilai pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih berada dibawah target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD tahun 2011-2018 yakni sebesar 5,61-5,96 persen. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi pada 60 persen wilayah kabupaten/kota Jawa Timur menunjukkan nilai di bawah rata-rata pertumbuhan

ekonomi Jawa Timur (5,5%) pada periode 2016-2018. Nilai pertumbuhan ekonomi yang berbeda pada setiap wilayah kabupaten/kota dipengaruhi oleh perbedaan faktor jumlah penduduk, pembangunan manusia, penduduk miskin, dan tenaga kerja yang tersedia dalam suatu wilayah. Berdasarkan data yang telah dipaparkan menunjukkan jumlah penduduk yang berbeda pada setiap wilayah kabupaten/kota, kemudian indeks pembangunan manusia yang meningkat nilainya selama periode 2016-2018 tetapi nilai IPM Jawa Timur masih di bawah IPM nasional. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki tren meningkat dengan dibarengi angka kemiskinan Jawa Timur yang semakin berkurang dari tahun 2016-2018, namun angka kemiskinan pada 13,1 persen wilayah kabupaten/kota masih mengalami *fluktuasi*. Selain itu wilayah kota mayoritas memiliki nilai persentase penduduk miskin masih lebih kecil dibandingkan persentase penduduk miskin wilayah kabupaten. Hal ini sejalan dengan nilai pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) wilayah kota nilainya lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten di Jawa Timur selama periode 2016 hingga 2018.

Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, persentase penduduk miskin, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan status wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Tujuan ini menarik penulis untuk melakukan penelitian lebih lengkap dari sebelumnya yaitu menganalisis variabel independen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga menjelaskan pengaruh status wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kota dan wilayah kabupaten Jawa Timur. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai RPJMK dan memperbaiki pembangunan manusia agar mensejahterakan masyarakat dalam segala aspek. Selain itu hasil penelitian dapat memudahkan pemerintah menentukan kebijakan terkait masalah yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Pembangunan ekonomi regional merupakan faktor penting untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan ekonomi regional digambarkan oleh

laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan pada suatau daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan pada tahun tertentu menunjukkan pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran pada suatu wilayah. Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu wilayah yang luas diantara Provinsi yang ada di Jawa. Kondisi ini membuat Provinsi Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup tinggi (5,47%) di atas pertumbuhan ekonomi nasional (5,43%) di tahun 2018. Nilai pertumbuhan ekonomi yang berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional masih belum menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang stabil atau meningkat setiap tahun di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi tahun 2017 yang sempat mengalami penurunan sebesar 0,11 persen selanjutnya naik sebesar 0,01 persen pada tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur berasal dari pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten/kota yang nilainya berbeda-beda. Pertumbuhan ekonomi untuk wilayah kota-kota Jawa Timur nilainya lebih baik dibandingkan wilayah kabupaten-kabupaten di Jawa Timur. Menurut Jhingan (2010) nilai pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda dari segi wilayah maupun tahun disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dan demografis diantaranya besarnya sumber daya, modal, teknologi, dan jumlah penduduk setiap daerah.

Faktor pertumbuhan ekonomi yang saat ini menjadi tantangan Jawa Timur adalah faktor sumberdaya manusia misalnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga meningkatkan pertumbuhan penduduk. Peningkatan penduduk setiap tahunnya seringkali memunculkan permasalahan kemiskinan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian Okwori et al., (2015) menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk menciptakan masalah sosial antara lain pengangguran, kemiskinan, terorisme, dan ketimpangan pendapatan. Penelitian Nilsen (2007) mengemukakan bahwa masalah kemiskinan akan menghambat individu mengembangkan ketrampilan sehingga mengurangi potensi dalam kegiatan ekonomi. Kondisi ini didorong oleh keterbatasan pendapatan untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pangan secara layak.

Penambahan jumlah penduduk seringkali menyebabkan pertumbuhan penduduk yang sulit dikendalikan. Fenomena pertumbuhan penduduk apabila

tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai akan menciptakan masalah kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan masalah mendasar yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Penduduk miskin yang terus meningkat akan menghambat pembangunan ekonomi dimana penduduk miskin memiliki akses terbatas dalam memenuhi kebutuhan pokok sehingga mengurangi potensi pembelian pada pasar domestik. Keterbatasan ini disebabkan oleh pendapatan yang minim. Kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dapat ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2 dimana pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami *fluktuasi* sejalan dengan uraian data bahwa 13,1 persen wilayah Jawa Timur mengalami *fluktuasi* persentase penduduk miskin selama periode 2016 hingga 2018.

Jumlah penduduk sebagai faktor kependudukan menghasilkan jumlah tenaga kerja. Tenaga kerja bagi pembangunan manusia merupakan komponen penting dalam faktor produksi. Jumlah tenaga kerja yang besar akan menghasilkan *output* yang besar jika dikelola dengan benar. Sumberdaya manusia yang memiliki ketrampilan tinggi akan menghasilkan lebih banyak *output* sehingga pendapatan daerah mengalami kenaikan. Salah satu indikator kesejahteraan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi melalui tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk dalam usia kerja (15-60 tahun). Angka tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi (mendekati 100%) menandakan semakin banyak angkatan kerja yang tersedia didukung penyerapan ke dalam lapangan pekerjaan akan mendorong pembangunan ekonomi.

Menurut UNDP komponen lain yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan manusia. Indikator yang menjadi tolak ukur capaian pembangunan manusia yaitu indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur memiliki tren yang meningkat setiap tahun meskipun nilai IPM masih di bawah IPM nasional pada tahun 2016-2018. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari 3 komponen yang dilihat berdasarkan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak masyarakat. Ketiga indikator merupakan faktor penting yang saling berpengaruh dalam pertumbuhan

ekonomi. Hasil penelitian Elistia dan Barlia (2018) menguraikan bahwa pembangunan manusia saling berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, dimana capaian pembangunan manusia yang tinggi akan memberikan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian dapat digambarkan pertumbuhan ekonomi yang nilainya lebih dari pertumbuhan nasional didukung oleh penambahan jumlah penduduk setiap tahun sehingga mendorong ketersediaan angkatan kerja seharusnya dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia. Kenyataanya pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan masih mengalami *fluktuasi*, sedangkan indeks pembangunan manusia Jawa Timur masih di bawah nilai IPM nasional. Selain itu wilayah perkotaan mayoritas memiliki rata-rata nilai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia yang lebih tinggi serta rata-rata persentase penduduk miskin lebih rendah dibandingkan wilayah kabupaten. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan pada jenis wilayah tersebut Hal ini menjadikan pentingnya mengetahui akar permasalahan sehingga ditemukan pemecahan masalah. Salah satunya dengan melakukan penelitian pengaruh pertumbuhan penduduk, IPM, persentase penduduk miskin, TPAK, dan status wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh persentase penduduk miskin terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?
4. Bagaimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?
5. Bagaimana pengaruh status wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan mempersempit ruang lingkup penelitian.

Adapun batasan yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian hanya menggunakan data sekunder dari wilayah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018
2. Penelitian ini hanya menjelaskan variabel yang telah ditentukan
3. Penelitian ini hanya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur
2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur
3. Pengaruh persentase penduduk miskin terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur
4. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur
5. Pengaruh status wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman serta pengetahuan bagi peneliti terkait pertumbuhan penduduk, kemiskinan, indeks pembangunan manusia, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan status wilayah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi bagi pembaca sebagai sumber referensi teori untuk permasalahan yang relevan. Memberikan

landasan bagi pengembangan penelitian berikutnya.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi regional khususnya wilayah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur serta mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, kemiskinan, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan status wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Rujukan penelitian yang pertama dapat dilihat pada Okwori, Ajegi, dan Abu (2015) yang bertujuan mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Metode analisis menggunakan *vektor error correction*. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan penduduk mempengaruhi secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peneliti mendukung teori Malthus bahwa pertumbuhan penduduk merugikan pembangunan manusia. Pernyataan ini mengandung makna pertumbuhan penduduk menciptakan masalah yaitu kemacetan, emigrasi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan terorisme.

Rujukan penelitian yang kedua terkait pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada Olusogo Olamide Ogunleye, Oluwarotimi, dan Muazu Mubarak (2018) yang bertujuan mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Penelitian berlokasi di Nigeria selama periode 1981-2015 menggunakan model regresi *OLS*. Hasil penelitian menunjukkan populasi penduduk yang meningkat akan menambah angkatan kerja produktif dalam kegiatan perekonomian sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang semakin besar akan menciptakan pasar domestik besar dimana individu membeli barang-barang produksi secara lokal dan menaikkan pendapatan negara. Pernyataan ini mengindikasikan pertumbuhan penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang menjadi rujukan berikutnya dilakukan oleh David Togar Hutagaol, Tarmizi, dan Murni Daulay (2019) yang bertujuan menganalisis pengaruh laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, distribusi pendapatan, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan provinsi di Indonesia. Jenis data penelitian adalah *cross-section* tahun 2016 menggunakan persamaan regresi linear berganda dengan alat statistik SPSS. Hasil penelitian menunjukkan laju pertumbuhan penduduk dan indeks pembangunan manusia, distribusi pendapatan mempengaruhi secara negatif kemiskinan di Indonesia. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, distribusi

pendapatan, dan tingkat pengangguran mempengaruhi secara positif kemiskinan di Indonesia. Sehingga dapat diketahui laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, distribusi pendapatan, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Rujukan penelitian berikutnya dapat dilihat pada Elistia dan Barlia Annis (2018) yang bertujuan mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi pada sepuluh negara Asean mulai tahun 2010 hingga 2016. Sepuluh negara yang digunakan menjadi sampel penelitian yaitu Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos dan Thailand. Metode penelitian menggunakan model kausal dengan alat analisis berupa program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan terdapat korelasi IPM dan GDP per kapita pada sepuluh negara anggota ASEAN. Disimpulkan bahwa pencapaian pembangunan manusia direpresentasikan oleh indeks pembangunan manusia sedangkan keberhasilan pembangunan manusia direpresentasikan oleh pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut melalui Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Hubungan kausalitas merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pembangunan manusia yang baik, sebaliknya peningkatan pembangunan manusia dapat memberikan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Artinya, pembangunan manusia saling berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dalam nilai IPM serta pendapatan per kapita atau (GDP) per kapita suatu negara.

Penelitian rujukan berikutnya dapat dilihat pada Appiah, Richard, dan Doreen (2019) dengan penelitiannya yang bertujuan mengetahui dampak dan hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di Afrika. Lokasi penelitian di 5 negara Afrika yaitu Kenya, Tanzania, Rwanda, Ghana, dan Pantai Gading. Metode penelitian menggunakan analisis regresi data panel. Pengukuran pembangunan manusia menggunakan variabel modal, bantuan, investasi, tenaga kerja, dan inflasi. Hasil penelitian menunjukkan bantuan, inflasi, dan tenaga kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan modal dan investasi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Disimpulkan pembangunan manusia berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hasil

tidak terduga yang bertentangan dengan penelitian umumnya ditunjukkan pada variabel modal dan investasi memberi dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi mempengaruhi secara positif pada pertumbuhan ekonomi.

Rujukan penelitian berikutnya dapat dilihat pada Maharani (2017) yang bertujuan mengetahui pengaruh PDRB, upah minimum, dan investasi terhadap Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK) di Pulau Kalimantan dengan model persamaan data panel. Jenis data adalah data sekunder yang dikumpulkan dari empat provinsi di Kalimantan. Hasil penelitian menunjukkan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK, sedangkan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK. Variabel investasi direpresentasikan oleh Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tidak berpengaruh signifikan terhadap TPAK. Disimpulkan bahwa pengaruh positif dan negatif tenaga kerja dari hasil pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan system perekonomian daerah. Peneliti juga mendukung teori Todaro bahwa jumlah tenaga kerja yang besar akan mendorong tingkat produksi sehingga mendorong terciptanya pasar domestik.

Rujukan berikutnya dapat dilihat pada Budi Prayitno dan Renta Yustie (2020) yang memiliki tujuan mengetahui pengaruh tenaga kerja, IPM, dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2014 hingga tahun 2018. Penelitian Budi dan Renta berlokasi di Provinsi Jawa Timur dengan model persamaan regresi panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh variabel tenaga kerja, IPM, dan kemiskinan bersifat parsial dan simultan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur selama periode 2014-2018. Disimpulkan bahwa tenaga kerja yang terserap dalam lapangan pekerjaan dan didukung oleh IPM yang baik akan mengurangi kemiskinan sehingga pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota mengalami kenaikan. Artinya, variabel bebas meliputi tenaga kerja, IPM, dan kemiskinan saling berhubungan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dimana tenaga

kerja bukan pengangguran dan tingginya standart hidup layak masyarakat dapat mengurangi masalah kemiskinan sehingga meningkatkan pendapatan daerah.

Rujukan penelitian berikutnya dilihat pada penelitian Muhammad Afzal, Muhammad Ehsan Malik, Ishrat Begum Kafeel Sarwar, dan Hina Fatima (2012) yang bertujuan mengetahui pengaruh pendidikan, modal fisik dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Auto Regressive Distribusi Log* (ARDL) ke Kointegrasi dan pendekatan *Toda Yamanoto Augmented Granger Causality* (TYAGC). Data penelitian dianalisis melalui bentuk *Unit Root Test*. Hasil penelitian pada kedua pendekatan penelitian menunjukkan variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan. Hubungan kausalitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi dicapai dengan cara pengentasan kemiskinan oleh pemerintah melalui promosi pendidikan dan memperkenalkan program keamanan sosial yang disebut “Conditional Transfer Cash Program”. Selain itu pertumbuhan dan pendidikan dapat memunculkan lapangan pekerjaan serta tenaga kerja yang berkualitas sehingga mengurangi kemiskinan di masyarakat. Artinya, kemiskinan saling berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dimana kemiskinan dapat ditekan melalui faktor pendidikan dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, penelitian terdahulu terkait kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada Neil Lee dan Paul Sisson (2016) yang bertujuan mengetahui hubungan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Inggris. Penelitian berlokasi di kota-kota Inggris Raya menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah Inggris berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut.

Disimpulkan rumah tangga menjadi faktor penting dalam variabel kemiskinan. Tingkat kemiskinan mengurangi permintaan konsumen sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Faktor yang juga mendorong terjadinya kemiskinan adalah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan rendah. Selain itu belum ditemukan bukti jika pertumbuhan ekonomi di perkotaan yang tinggi dapat memperbaiki tenaga kerja berketrampilan rendah. Penelitian ini menunjukkan

bahwa rumah tangga miskin mengurangi pengeluaran konsumsi sehingga berdampak terhadap pendapatan nasional.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang dapat diteliti melalui beberapa metode. Penelitian terdahulu menggunakan faktor-faktor yang berbeda untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan menyesuaikan kondisi serta permasalahan yang terjadi pada lokasi penelitian. Penelitian oleh penulis memiliki tujuan sama dengan penelitian sebelumnya yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, landasan teori dan pemilihan variabel yang digunakan sebagai bahan penelitian juga memiliki beberapa persamaan. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel pertumbuhan penduduk dan status wilayah. Perbedaan dalam penelitian juga ditunjukkan pada jenis data menggunakan data *cross-section* pada tahun 2018 dengan model regresi berganda variabel *dummy* belum pernah digunakan pada lokasi penelitian.

2.2 Teori

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita *riil* penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1994). Tujuan dari pembangunan ekonomi untuk perbaikan kualitas hidup, peningkatan barang-barang dan jasa, serta penciptaan lapangan kerja baru dengan upah yang layak (Manik, 2011). Paradigma pembangunan ekonomi juga dipandang dari segi ekonomi maupun non ekonomi sehingga pembangunan bersifat menyeluruh. Hal ini menyebabkan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan satu konsep yang saling berhubungan.

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan penambahan atau pengurangan pendapatan nasional *riil* dari waktu ke waktu (Sukirno, 2012). Pertumbuhan ekonomi menurut Arsyad (2010) adalah peningkatan *output* masyarakat yang disebabkan semakin banyak jumlah faktor produksi tanpa adanya perubahan teknologi. Tarmizi (2013) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan *output riil* dalam ukuran Produk

Domestik Bruto (PDB) *rill* atau pendapatan perkapita sepanjang waktu. Pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi dua yaitu pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi regional. Pertumbuhan ekonomi nasional dinilai dari seluruh wilayah negara sedangkan pertumbuhan ekonomi regional berasal dari wilayah kabupaten/kota dalam suatu provinsi.

Status wilayah kabupaten atau kota memiliki perbedaan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Kabupaten dan kota memiliki beberapa karakteristik diantaranya:

1. Luas wilayah, luas wilayah kabupaten lebih besar dibandingkan wilayah kota
2. Kependudukan, penduduk wilayah kabupaten lebih padat dibandingkan penduduk kota
3. Sosial budaya, penduduk wilayah kabupaten kurang memiliki fasilitas pelayanan publik yang lengkap dibandingkan wilayah kota

Selain jenis wilayah adapun faktor-faktor utama yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi menurut Todaro dan Smith (2006) yaitu:

1.) Akumulasi Modal

Akumulasi modal adalah proses menyalurkan pendapatan kemudian ditabung untuk kegiatan investasi di masa depan. Tujuan akumulasi modal tidak lain untuk memperbesar *output* di masa mendatang. Modal yang dapat diinvestasikan meliputi lahan dan sumberdaya manusia. Investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui investasi infrastruktur dengan membangun jembatan, jalan, gedung, listrik, dan air bersih. Pembangunan infrastruktur dapat mempermudah kegiatan pembangunan dalam meningkatkan pendapatan nasional. Selanjutnya investasi yang bertujuan meningkatkan kualitas modal manusia melalui pembinaan sumber daya manusia sehingga *output* produksi semakin besar. Untuk mendukung tenaga kerja yang berkualitas tinggi maka diperlukan program pendidikan dan pelatihan kerja.

2.) Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Faktor penting peningkatan jumlah penduduk dianggap faktor positif mendorong kenaikan angkatan kerja. Apabila semakin banyak tenaga kerja produktif maka meningkatkan potensi pasar domestik.

3.) Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi disebabkan oleh teknologi baru untuk memperbaiki cara-cara lama dalam pekerjaan. Perkembangan teknologi membawa kemajuan teknologi yang diklasifikasikan meliputi: Pertama, kemajuan teknologi bersifat netral terjadi apabila kombinasi input dan kuantitas lebih rendah pada tingkat *output*. Kedua, kemajuan teknologi bersifat hemat tenaga kerja atau modal apabila input modal dan tenaga kerja lebih rendah dibandingkan capaian *output*.

Alat ukur menghitung pertumbuhan ekonomi suatu daerah:

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB adalah agregat nilai tambah dari semua barang atau jasa yang dihasilkan oleh masing-masing sektor menurut lapangan usaha disuatu negara baik atas dasar harga konstan maupun harga yang berlaku (Rustiadi, 2011).

Pertumbuhan ekonomi makro suatu wilayah negara ditunjukkan oleh tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). PDB merupakan faktor penting dalam membentuk pendapatan nasional. PDB berasal dari *output* dan input yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri maupun luar negeri. Perhitungan PDB atau pendapatan nasional menurut BPS (Badan Pusat Statistik) menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran (Kuncoro, 2013). Produk domestik bruto dapat dihitung atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDB atas dasar harga yang berlaku yang disebut juga PDB nominal menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan. Sedangkan PDB harga konstan atau PDB *riil* adalah menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai harga dasar.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi pada jangka waktu tertentu (Sasana, 2006). PDRB mencerminkan besaran pendapatan yang dihasilkan suatu daerah dalam satu tahun dan dinyatakan dengan harga pasar. Perhitungan PDRB lebih menunjukkan kesejahteraan masyarakat karena perhitungan PDRB hanya mengukur pada lingkup wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Faktor-faktor produksi mempengaruhi besar atau kecil Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) tergantung pada pengelolaan sumberdaya yang ada pada wilayah tersebut. PDRB dibagi menjadi dua yaitu PDRB menurut harga konstan dan PDRB menurut harga berlaku. PDRB harga konstan menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada seluruh sektor selama periode waktu tertentu. Sedangkan PDRB menurut harga berlaku menunjukkan pendapatan yang dihasilkan oleh sumber daya yang dimiliki dalam daerah tersebut. Pengukuran pertumbuhan ekonomi dengan PDRB menurut harga konstan dapat disajikan pada model di bawah ini:

$$Y = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_t} \times 100\%$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan ekonomi (%)

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto *riil* pada tahun t (Rp)

$PDRB_{t-1}$ = Produk Domestik Regional Bruto *riil* pada tahun sebelumnya (Rp)

Pertumbuhan ekonomi merupakan capaian keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong pembangunan pada aspek lainnya. Adapun beberapa teori pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

1.) Teori Pertumbuhan Adam Smith

Teori pertumbuhan ekonomi oleh Adam Smith menguraikan faktor pertumbuhan *ouput* dan pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi pendapatan per kapita wilayah. Smith menjelaskan kenaikan pendapatan per kapita disebabkan oleh tenaga kerja yang terus bertambah akibat kenaikan populasi penduduk. Penambahan jumlah penduduk dalam jangka panjang akan memunculkan hukum produksi marginal yang mengalami penurunan menghasilkan *output* sama dengan produksi marginal. Jumlah penduduk pada titik tertinggi disebut penduduk optimal. Apabila penduduk melebihi titik penduduk optimal maka akan menyebabkan penurunan *output* (Kuncoro, 2010).

Tenaga kerja merupakan komponen penting dalam input produksi. Untuk meningkatkan produktivitas kerja maka perlu melakukan pembagian kerja berdasarkan ketrampilan individu. Upaya pembagian kerja sesuai dengan tingkat ketrampilan oleh pelaku ekonomi tidak lepas dari faktor pendorong yaitu penemuan teknologi hemat daya dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja. Sistem ini akan bekerja pada masyarakat modern yang mengalami perubahan menuju masyarakat kapitalistik (Kuncoro, 2010).

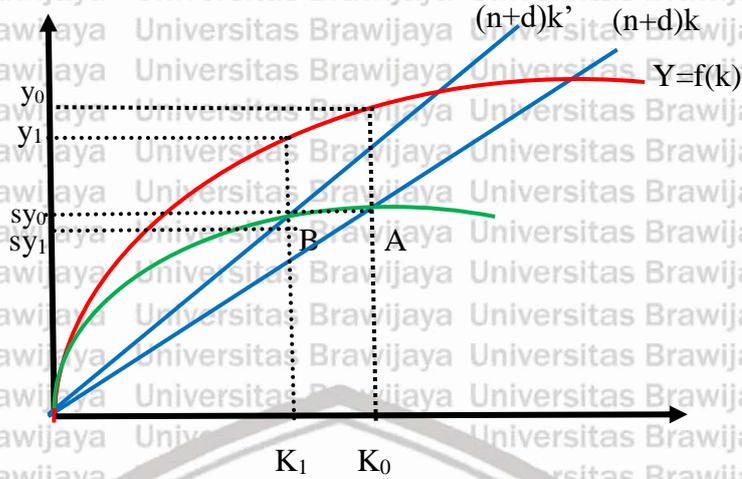
2.) Teori Pertumbuhan Solow

Teori pertumbuhan Solow disebut juga teori pertumbuhan neo-klasik.

Teori ini mengembangkan model teori pertumbuhan Harrod-Domar dengan menambahkan tenaga kerja sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sedangkan teknologi sebagai variabel bebas ke dalam model persamaan pertumbuhan. Solow menguraikan hubungan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan perkembangan teknologi pada model persamaan pertumbuhan. Semua faktor atau variabel akan mempengaruhi *output* barang dan jasa yang diproduksi dalam negara (Mankiw, 2006).

Model pertumbuhan Solow menjelaskan perubahan *output* yang diakibatkan oleh hubungan modal, tenaga kerja dan teknologi dalam jangka panjang. Kondisi ini akan membawa pertumbuhan ekonomi menuju titik *steady-state* dalam ekuilibrium ekonomi jangka panjang. Titik *steady-state* merupakan titik dimana *output* produksi bersifat konstan atau barang dan jasa yang dihasilkan bersifat tetap. Asumsi yang digunakan dalam persamaan model pertumbuhan Solow adalah modal yang mengalami *diminishing returns*. Produk marginal modal yang menurun berasal dari penambahan akumulasi modal selalu lebih sedikit dari sebelumnya terhadap penambahan *output* dan persediaan tenaga kerja dianggap tetap. Pertumbuhan tenaga kerja yang konstan dan tidak adanya kemajuan teknologi akan mendorong modal pada titik *diminishing returns* (Mankiw, 2006). Kondisi *diminishing returns* digambarkan pada kurva berikut:

Solow Growth and Population Growth rate change



Sumber: Dornbusch, F dan Starz (2008)

Gambar 4. Perubahan Titik Steady State Perekonomian dalam Pertumbuhan Neoklasik

Gambar 4 menunjukkan pergeseran dimana titik A merupakan titik awal keseimbangan *steady state* (y_0, k_1) mengalami pergeseran ke kiri atas akibat penambahan jumlah penduduk sehingga menuju titik B. Kenaikan jumlah penduduk menyebabkan penurunan *steady state* dari modal per kapita (k) dan *output* per kapita (y) sedangkan faktor teknologi dan angkatan kerja dianggap pada kondisi *ceteris paribus*.

3.) Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar

Teori pertumbuhan ekonomi ini dikembangkan oleh dua ekonom Evsey Domar dan Sir Roy F. Harrod yang merupakan penyempurnaan dari teori Keynes. Teori ini menekankan investasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teori ini menjelaskan bahwa setiap tambahan investasi baru akan menaikkan hasil GDP (Todaro dan Smith, 2006). Teori Harrod-Domar menggunakan tiga komponen yaitu rasio modal-output (k), rasio tabungan nasional (s), dan jumlah investasi baru (S).

Menurut Harrod-Domar setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi baru sebagai tambahan stok modal.

Hubungan tersebut telah dikenal dengan istilah rasio modal-*output* (COR). Dalam teori ini dinyatakan bahwa jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan



menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari *output* totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian di investasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh. (Arsyad, 2010).

4.) Teori Pertumbuhan Endogen

Konsep teori pertumbuhan endogen merupakan model pertumbuhan ekonomi baru (*new growth theory*). Teori Solow muncul akibat ketidakpuasan pada model Neo-klasik yang mengasumsikan teknologi sebagai variabel bebas dalam pertumbuhan jangka panjang. Model pertumbuhan Solow menggunakan teknologi sebagai variabel endogen untuk meningkatkan *output* per kapita. Teori ini menjelaskan model pertumbuhan dengan *aggregate increasing returns*. Kemajuan teknologi yang didukung sumberdaya manusia berkualitas akan mendorong *profit-maximizing*. Model *endogenous growth* menunjukkan peningkatan *skill* tenaga kerja melalui *Research and Development* (R&D) serta akumulasi pengetahuan (Mankiw, 2006).

Teori Pertumbuhan Endogen memerhatikan pengembalian modal dalam menjaga pertumbuhan berkelanjutan. Apabila fungsi produksi adalah $Y=AK$, dimana Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit modal, maka selanjutnya $\Delta K = sY - \delta K$, dimana ΔK adalah perubahan persediaan modal, sY adalah investasi dan δK adalah depresiasi, maka tingkat pertumbuhan output ditunjukkan oleh persamaan berikut:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta K}{K} = sA - \delta$$

$\Delta Y/Y$ adalah tingkat pertumbuhan output, $\Delta K/K$ adalah tingkat pertumbuhan modal. Selama $sA > \delta$ atau $sA - \delta$ lebih besar daripada satu, pertumbuhan perekonomian dapat berlangsung meskipun tanpa asumsi kemajuan teknologi. Dalam pertumbuhan Endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan berkesinambungan, dengan K (modal) diasumsikan secara lebih luas termasuk di dalamnya adalah ilmu pengetahuan.

2.2.2 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah peristiwa penambahan maupun pengurangan populasi penduduk pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Menurut Mulyadi (2014) pertumbuhan penduduk dijelaskan sebagai

peristiwa bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk berdasarkan komponen penyusun meliputi (1) kelahiran (fertilitas), (2) kematian (mortalitas), (3) migrasi masuk dan (4) migrasi ke luar. Berikutnya pertumbuhan terbagi menjadi dua jenis yaitu pertumbuhan alami dan pertumbuhan neto. Pertumbuhan alami adalah selisih antara mortalitas dan fertilitas, sedangkan pertumbuhan neto merupakan selisih antara migrasi ke luar dan migrasi ke dalam. Pertumbuhan penduduk setiap tahun dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan penduduk} = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

P_t = Jumlah penduduk tahun ke- t

P_{t-1} = Jumlah penduduk tahun sebelumnya

Teori Malthus (1798) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan produksi pangan mengikuti deret hitung. Hal ini menandakan jumlah penduduk cenderung lebih cepat meningkat dibandingkan dengan persediaan pangan. Sumberdaya untuk menyediakan pangan yang terbatas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kondisi ini memiliki kecenderungan masyarakat masuk ke dalam jurang kemiskinan.

Penambahan penduduk yang sangat cepat menyebabkan permintaan akan barang dan jasa mengalami kenaikan sedangkan penawaran barang dan jasa tetap. Akhirnya biaya dan harga barang menjadi naik sedangkan pendapatan masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Keadaan ini memperburuk standar hidup layak dalam kehidupan penduduk sehingga menyebabkan lingkaran kemiskinan (Jhingan, 2010).

Populasi penduduk adalah sejumlah manusia yang bertempat tinggal pada wilayah tertentu dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk merupakan faktor penting yang sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi biasanya direpresentasikan melalui PDRB sebagai capaian kemajuan perekonomian negara (Subri, 2003). Hubungan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi merupakan hubungan yang saling mempengaruhi.

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat berdampak pada perekonomian, kehidupan sosial, dan politik masyarakat. Jumlah penduduk yang terus bertambah

menyebabkan peningkatan angkatan kerja sehingga dibutuhkan penyediaan lapangan kerja yang luas. Jika penambahan tenaga kerja tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan akan mengakibatkan masalah pengangguran dalam masyarakat (Purwati, 2015).

2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia menurut Human Development Report merupakan proses memperbesar pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Indeks

Pembangunan manusia (IPM) merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang memperhatikan aspek sosial. Indeks Pembangunan Manusia adalah capaian keberhasilan pembangunan manusia berdasarkan komponen dasar kualitas hidup

(Feriyanto, 2014). Definisi indeks pembangunan manusia menurut Badan Pusat Statistik adalah hasil pengukuran dari pendidikan, angka melek huruf, angka harapan hidup, dan satandart hidup layak masyarakat. Paradigma pembangunan manusia menurut Mailendra (2009) digolongkan menjadi empat komponen sebagai berikut:

1. Produktivitas

Kegiatan untuk memperoleh penghasilan atau upah diikuti oleh seluruh masyarakat. Proses kegiatan bertujuan meningkatkan produktivitas dalam mendorong *output* produksi.

2. Ekuitas

Masyarakat memiliki hak yang sama dan memperoleh keadilan untuk mengakses sumberdaya. Keadilan untuk mengakses sumberdaya akan mempengaruhi kelayakan standar hidup individu.

3. Kestinambungan

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses komponen pembangunan manusia. Kesempatan akses tidak hanya diperoleh pada masa sekarang melainkan juga pada masa mendatang.

4. Pemberdayaan

Masyarakat terlibat dalam penentuan keputusan pembangunan manusia yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan manusia tidak hanya menguntungkan sebagian pihak tetapi harus merata untuk seluruh elemen masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat diukur melalui indeks komposit berdasarkan tiga komponen yaitu: Pertama, Angka Harapan Hidup (*Life Expectancy at Birth*) sebagai indeks kesehatan; Kedua, Angka Melek Huruf penduduk dewasa (*Adult Literaci Rate*) dan Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling*) sebagai indeks pendidikan; Ketiga, Kemampuan Daya Beli (*Purchasing Power Parity*) sebagai indeks pengeluaran (UNDP, 1990). Perhitungan IPM metode baru menggunakan rumus geometrik dapat ditunjukkan sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{(Ikesehatan) \times (Ipendidikan) \times (Ipengeluaran)} \times 100$$

Keterangan:

$I_{kesehatan}$ = Indeks kesehatan

$I_{pendidikan}$ = Indeks pendidikan

$I_{pengeluaran}$ = Indeks pengeluaran

Berdasarkan nilai perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka tingkatan indeks pembangunan manusia (IPM) menurut UNDP dapat dibagi berdasarkan empat golongan sebagai berikut:

- 1.) IPM sangat tinggi: $IPM \geq 80$
- 2.) IPM tinggi : $80 \leq IPM < 70$
- 3.) IPM sedang : $70 \leq IPM < 60$
- 4.) IPM rendah : $IPM < 60$

Hubungan pembangunan manusia dengan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh peran rumah tangga masyarakat. Rumah tangga memiliki kontribusi terhadap pembangunan manusia dalam mengakses kebutuhan pangan, pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini menggambarkan rumah tangga merupakan faktor penting dalam mewujudkan indeks pembangunan manusia sesuai perencanaan pemerintah. Besar atau sedikit akses rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatannya. Penduduk miskin cenderung mengonsumsi kebutuhan primer, sedangkan masyarakat menengah ke atas dapat mengonsumsi kebutuhan sekunder dan tersier. Konsumsi masyarakat yang tinggi akan menaikkan permintaan barang dan jasa sehingga mempengaruhi pendapatan daerah (Yuliarmi, 2008).

Hubungan lainnya antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh modal manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dipengaruhi oleh tingkat pembangunan manusia yang tinggi, dimana peningkatan

produktivitas dan kreativitas masyarakat mampu mengelola sumberdaya pada wilayah tersebut. Pengelolaan sumberdaya akan menghasilkan barang dan jasa berkualitas untuk meningkatkan pendapatan daerah (Brata, 2004).

2.2.4 Persentase Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan pengeluaran kebutuhan minimum yang setara 2100 kilokalori perkapita per hari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (BPS, 2019). Individu dikatakan dapat hidup dalam standar hidup layak apabila pendapatan yang mereka peroleh di atas garis kemiskinan yang sudah ditetapkan sehingga mencukupi kebutuhannya dari segi pangan, papan, dan sandang. Adapun persentase penduduk miskin dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]$$

Keterangan:

P_0 = Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di bawah garis kemiskinan

q = Banyak penduduk di bawah garis kemiskinan

z = Garis kemiskinan

Penduduk miskin memiliki ketidakmampuan dari segi ekonomi karena memiliki pendapatan di bawah standar hidup layak. Penduduk miskin berasal dari penduduk yang terus bertambah cepat kemudian membentuk angkatan kerja yang tinggi. Selanjutnya kondisi ini diperburuk dengan jumlah lapangan kerja yang terbatas sehingga berdampak pada pengangguran masyarakat. Mankiw (2006) menguraikan bahwa pengangguran merupakan masalah ekonomi makro yang sangat serius. Pengangguran berhubungan dengan pendapatan masyarakat. Hal ini digambarkan oleh masyarakat yang tidak terserap dalam lapangan pekerjaan maka tidak dapat menaikkan pendapatan. Tingkat pendapatan rendah merujuk pada

pengurangan tingkat kemakmuran dalam masyarakat. Dumairy (1997) menyatakan bahwa penumpukan angkatan kerja yang dihasilkan dari pengangguran akan memberikan pengaruh terhadap pembangunan ekonomi negara. Apabila lapangan pekerjaan tidak dapat menampung seluruh angkatan kerja maka masalah kemiskinan akan terjadi secara terus-menerus.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan rumah tangga atau individu dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga menyebabkan kelaparan, kekurangan gizi, dan pendapatan rendah (Made, 2010). Kemiskinan menurut Word Bank (2006) juga diartikan sebagai peristiwa hilangnya kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengakses sumberdaya atau kebutuhan hidupnya. Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar bagi negara terutama negara berkembang. Penyebab kemiskinan dikemukakan oleh Sharp (1996) yang dibagi menjadi tiga yaitu: Pertama, kemiskinan dalam lingkup mikro yang muncul dalam ketimpangan distribusi masyarakat akibat ketidaksamaan akses sumberdaya. Penduduk miskin hanya bisa mengakses sumberdaya dengan jumlah sedikit. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumberdaya manusia. Penduduk miskin merupakan sumberdaya manusia dengan produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas dipengaruhi oleh tingkat pendidikan individu, dimana penduduk miskin tidak dapat membiayai pendidikan dengan layak untuk meningkatkan ketrampilan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam akses modal.

Pengukuran kemiskinan menurut Arsyad (2010) yang seringkali digunakan terbagi menjadi dua yaitu:

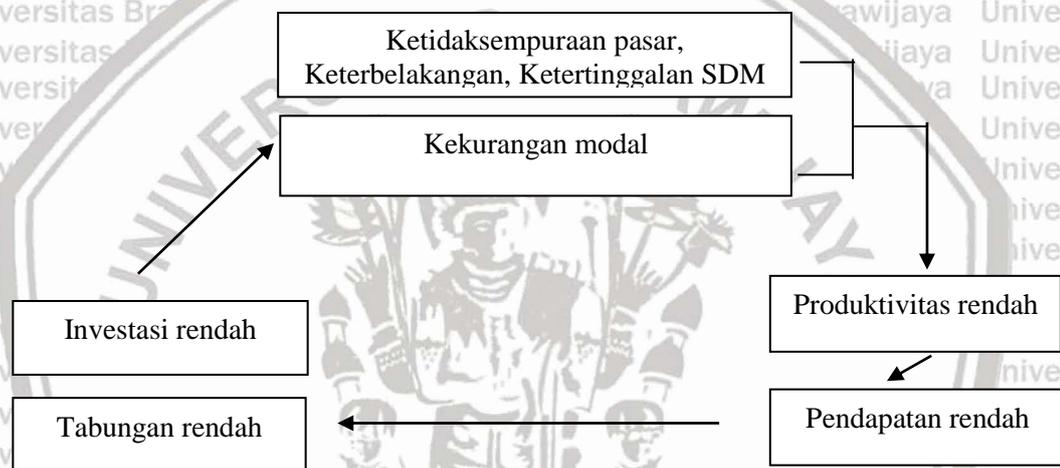
1.) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut berhubungan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat dikategorikan menjadi penduduk miskin apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan pendapatan yang diperolehnya. Kemiskinan absolut diukur dengan membandingkan pendapatan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Batas kemiskinan absolut digambarkan melalui garis kemiskinan. Penduduk yang masuk ke dalam golongan miskin menandakan tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan.

2.) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang ditentukan berdasarkan penilaian dalam lingkungan masyarakat tersebut. Masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar tetapi dikategorikan miskin apabila jumlah pendapatan individu masih jauh lebih rendah dibandingkan pendapatan individu lainnya dalam satu lingkungan. Kemiskinan semakin besar jumlahnya jika melihat perbedaan golongan atas dan golongan bawah. Kondisi ini menyebabkan semakin besarnya distribusi pendapatan dalam satu lingkungan.

Teori kemiskinan dikemukakan Nurske (1953) yang mengatakan “*A poor country is a poor because its poor*” atau “Negara miskin itu miskin karena dia itu miskin”. Pernyataan ini memunculkan lingkaran kemiskinan pada Gambar 3 sebagai berikut::



Sumber : Kuncoro (2010)

Gambar 5. Lingkaran Kemiskinan Baldwin dan Meier

Berdasarkan Gambar 5 diketahui bahwa lingkaran kemiskinan adalah rangkaian penyebab kemiskinan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menciptakan kondisi kemiskinan yang terjadi dalam jangka panjang dan negara kesulitan mencapai pembangunan lebih tinggi (Arsyad, 2010). Nurske menguraikan lingkaran perangkap kemiskinan berasal dari pendapatan masyarakat yang rendah. Produktivitas tenaga kerja yang rendah merupakan sumber penyebab rendahnya pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang rendah akan menyebabkan minat untuk menabung menjadi rendah. Apabila masyarakat enggan menabung maka akan menghambat pembentukan modal dalam kegiatan pembangunan negara. Penyebab kemiskinan lainnya berasal dari potensi pasar untuk menyediakan barang dan jasa tidak dapat mencukupi permintaan konsumen.

Hal ini disebabkan oleh produktivitas yang rendah. Rendahnya produktivitas dipengaruhi oleh modal yang terbatas di waktu sebelumnya.

2.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Angkatan kerja didefinisikan sebagai jumlah dari tenaga kerja yang tersedia dalam periode waktu tertentu. Angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja, pengangguran, dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja diperuntukkan untuk penduduk yang sedang menempuh pendidikan dan mengurus rumah tangga (Sukirno, 2010). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mempengaruhi besarnya angkatan kerja yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja.

Penduduk digolongkan ke dalam angkatan kerja apabila berumur lebih dari 15 tahun. Adapun untuk menghitung Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu:

$$TPAK = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

a : Jumlah Angkatan Kerja

b : Jumlah penduduk 15 tahun ke atas

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan ekonomi. Jumlah tenaga kerja akan berubah-ubah setiap tahunnya yang disebabkan pengaruh demografi penduduk. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) digunakan sebagai alat ukur perkembangan tenaga kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merujuk pada persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK menandakan peluang kesempatan kerja untuk penduduk dalam usia angkatan kerja. Kondisi ini menyebabkan TPAK mendorong besar atau kecil *ouput* barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk yang bekerja sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDRB.

Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung dari bertambahnya ketersediaan faktor-faktor produksi misalnya penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal, dan perkembangan teknologi. Teori ini dikenal dengan rasio modal-*output* dimana tingkat *output* dihasilkan dari beberapa kombinasi jumlah modal dan tenaga kerja yang berbeda-beda (Arsyad, 2010). Perbedaan

kombinasi jumlah modal dan tenaga kerja akan menghasilkan perbedaan tingkat *output* serta tingkat efisiensi. Seringkali input kecil mampu menghasilkan *output* besar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik.



III. KERANGA TEORITIS

3.1 Kerangka Pemikiran

Pembangunan ekonomi merupakan faktor penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang mengalami kemajuan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Perkembangan pertumbuhan ekonomi tentunya dipengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan nilai pertumbuhan ekonomi pada beberapa wilayah. Teori pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu ketersediaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, akumulasi modal, dan teknologi. Teori ini dibuktikan dengan penelitian Raharjanti (2019) menunjukkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu pengangguran, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia. Sedangkan Mohsen dan Chua (2015) meneliti keterbukaan perdagangan, investasi, dan populasi penduduk merupakan faktor yang turut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jumlah penduduk sebagai salah satu faktor modal manusia atau sumberdaya manusia (SDM) yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ogunleye et al., (2018) menemukan bahwa penambahan populasi akan meningkatkan angkatan kerja. Angkatan kerja akan berkontribusi aktif dalam perekonomian. Jumlah penduduk yang meningkat juga memperluas pasar domestik dimana masyarakat turut membeli barang-barang produksi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Penelitian Shari et al., (2013) menemukan bahwa pertumbuhan penduduk berhubungan dengan konsumsi. Jumlah penduduk yang meningkat akan menyebabkan konsumsi pada suatu daerah meningkat. Masyarakat akan mengeluarkan pendapatannya untuk memenuhi konsumsi sehingga masyarakat melakukan pembelian barang dan jasa. Pendapatan yang masyarakat keluarkan menggambarkan penduduk turut berkontribusi dalam pendapatan daerah. Pendapat ini didukung oleh penelitian.

Permasalahan yang terkait dengan pertumbuhan penduduk adalah kemiskinan. Penduduk miskin menjadi faktor penghambat dalam pertumbuhan ekonomi sehingga menjadikan penduduk miskin sebagai variabel yang juga

memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Mirza (2012) mencerminkan kemiskinan sebagai masalah yang kompleks berawal dari ketidakmampuan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga mengabaikan kebutuhan lainnya. Kondisi ini akhirnya menjadikan nilai pembangunan manusia tidak sesuai dengan target yang sudah direncanakan pemerintah untuk mencapai keberhasilan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah.

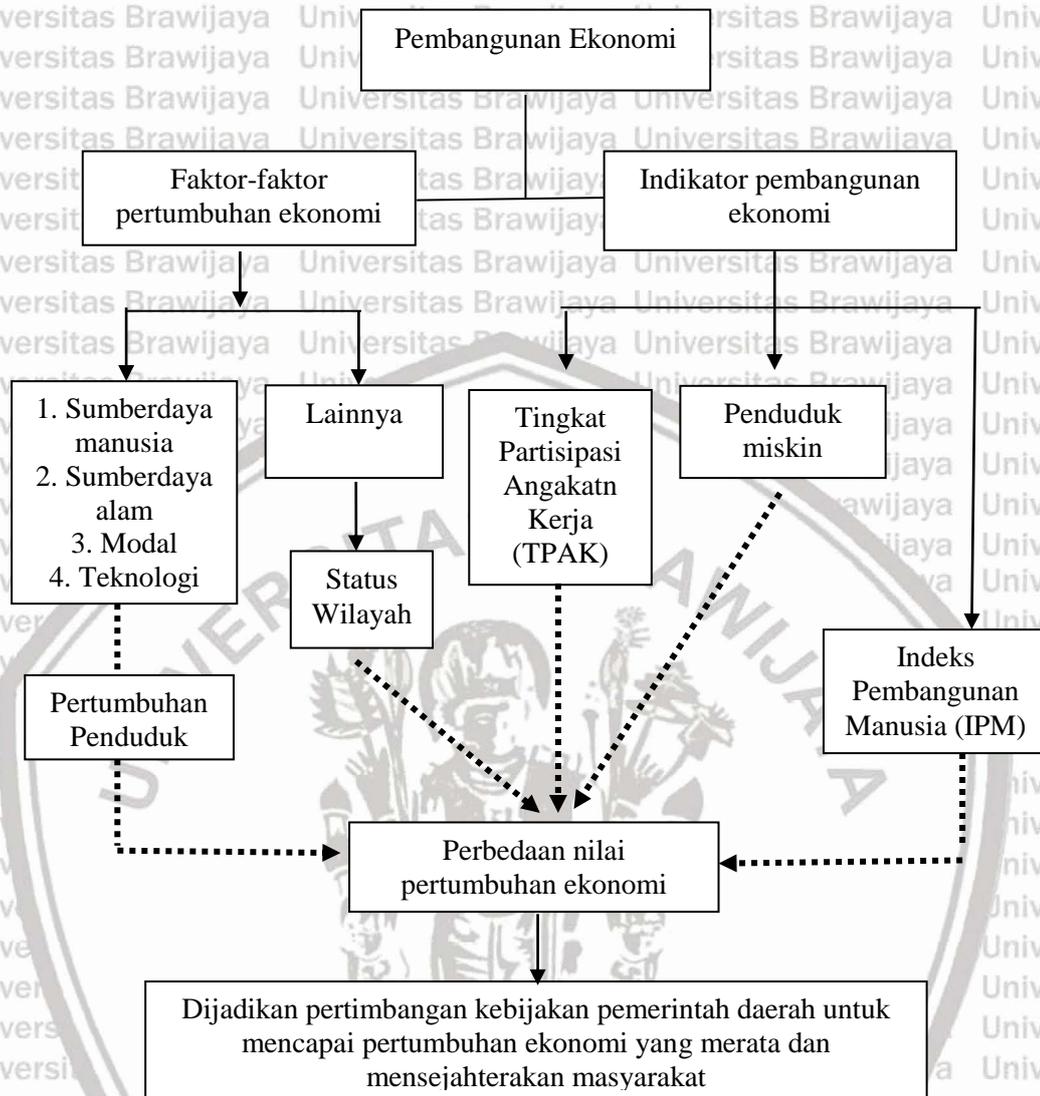
Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan indikator pertumbuhan ekonomi untuk mengetahui seberapa besar dan pengaruh positif atau negatif terhadap pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) salah satu indikator pembangunan ekonomi yang bertujuan mengukur capaian pembangunan manusia dari segi sumberdaya manusia suatu daerah dalam pembangunan ekonomi. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator yang menilai masyarakat dalam mengakses dimensi kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Penelitian Susanto dan Lucky (2013) menyimpulkan peningkatan IPM yang berasal dari kualitas sumberdaya manusia berkualitas akan menghasilkan barang dan jasa lebih banyak sehingga harga barang mengalami penurunan. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk meningkatkan daya beli. Penelitian tersebut sejalan dengan temuan Sitepu dan Sinaga (2005) yang menunjukkan bahwa sumberdaya manusia yang berkualitas mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan rumah tangga. Rumah tangga menjadi faktor penting dalam menyumbangkan pendapatan yang diperoleh untuk mengakses tiga komponen dalam indikator pembangunan manusia. Pendapatan individu yang sedikit akan memicu daya beli yang sedikit sehingga berdampak pada indeks pembangunan manusia. Nilai IPM yang rendah juga merefleksikan penurunan kemakmuran pada masyarakat. Salem (2018) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa standart hidup yang kurang baik menjadikan *output* perkapita mengalami penurunan.

Selain Indeks Pembangunan Ekonomi (IPM), indikator kesejahteraan yang dapat mengukur pembangunan ekonomi adalah tingkat pengangguran pada masyarakat. Pengangguran berkaitan erat dengan tenaga kerja. Faktor kependudukan berasal dari jumlah penduduk juga mendukung jumlah

ketersediaan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja terbagi dalam kelompok angkatan kerja serta bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan pernah bekerja, sedangkan kelompok bukan angkatan kerja diisi oleh pengangguran. Nanda (2019) dalam penelitiannya berpendapat bahwa pertumbuhan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tidak diimbangi dengan ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan akan menyebabkan masalah pengangguran sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan antar wilayah. Permasalahan lainnya yang secara tidak langsung mempengaruhi kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah kemajuan teknologi yang saat ini perlahan menggantikan tenaga manusia untuk meningkatkan efisiensi produksi. Kondisi ini membuat sumberdaya manusia tanpa ketrampilan atau berkualitas rendah akan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Akhirnya pengangguran akan menciptakan kemiskinan yang selanjutnya menjadi beban bagi pembangunan ekonomi karena menciptakan ketimpangan pendapatan daerah. Penelitian Rozmar et al., (2017) mengemukakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang meningkat dari tahun ke tahun apabila dimanfaatkan dengan maksimal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi TPAK yang penyebaran antar penduduk tidak merata akan menyebabkan pemanfaatan tenaga kerja tidak proporsional dalam efisiensi produksi sehingga menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan ekonomi diduga dipengaruhi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya yaitu status wilayah. Status wilayah daerah provinsi terbagi menjadi dua yaitu wilayah kabupaten dan wilayah kota. Wilayah kabupaten atau kota memiliki karakteristik yang menyebabkan perbedaan nilai pertumbuhan ekonomi yang berasal dari faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah penduduk wilayah kota lebih banyak dibandingkan wilayah kabupaten sehingga pertumbuhan penduduk di kota juga cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten. Selanjutnya jumlah pertumbuhan ekonomi pada wilayah kota lebih berkembang cepat dibandingkan wilayah kabupaten yang mayoritas wilayahnya masih berupa pedesaan bukan industri (Amaliah, 2004). Karakteristik yang dimiliki wilayah kabupaten dan kota menjadikan alasan peneliti menggunakan status wilayah sebagai variabel *dummy*

dalam penelitian. Maka dari itu berdasarkan alur pemikiran tersebut dapat digambarkan konsep kerangka pemikiran dalam penelitian ini pada Gambar 6:



Keterangan:
 → : Alur pikir
 -.-> : Menyebabkan

Gambar 6. Kerangka Pemikiran

3.2 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur
2. Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur

3. Diduga persentase penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur
4. Diduga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur
5. Diduga perbedaan pertumbuhan ekonomi wilayah kota dan wilayah kabupaten berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional bertujuan mempermudah pengumpulan data dan menghindari perbedaan interpretasi pada variabel yang digunakan Penelitian ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel yang diamati sebagai variabel bebas adalah pertumbuhan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase penduduk miskin, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan status wilayah. Sedangkan variabel yang dipengaruhi variabel bebas dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pengukuran variabel pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk pada waktu tertentu dan waktu sebelumnya. Perubahan jumlah penduduk ini disebabkan oleh faktor migrasi, *mortalitas* dan *fertilitas* pada setiap wilayah.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks pengeluaran (daya beli). Indeks pendidikan diperoleh dari perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Selanjutnya, indeks kesehatan diperoleh dari perbandingan nilai minimum dan maksimum Angka Harapan Hidup (AHH) nilai, sedangkan indeks pengeluaran diperoleh dari perbandingan antara nilai minimum dan maksimum pengeluaran masyarakat. IPM menjelaskan keadaan masyarakat dalam mengakses kebutuhan dari segi kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

3. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin ditunjukkan oleh persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk pada suatu daerah.

Kemiskinan disebabkan oleh keterbatasan dalam mengakses sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan dasar pada hidupnya meliputi kebutuhan pangan maupun non pangan.

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja terhadap total angkatan kerja pada suatu wilayah. Penduduk ini digolongkan sebagai penduduk yang aktif bekerja.

5. Status Wilayah

Status wilayah adalah perbedaan jenis wilayah yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Pembagian jenis wilayah terbagi menjadi dua yaitu wilayah kota dan wilayah kabupaten. Penggunaan variabel *dummy* untuk melihat perbedaan pertumbuhan ekonomi antara wilayah kota dan kabupaten. $D_1 = 1$ jika daerah kabupaten, sedangkan $D_1 = 0$ jika daerah kota.

6. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perbandingan nilai PDRB harga konstan pada waktu tertentu dengan waktu sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah variabel yang digunakan untuk mengetahui pendapatan nasional atau PDB dalam suatu daerah selama periode tertentu. Pendapatan nasional dapat diukur melalui PDRB *riil* atau PDRB menurut harga konstan.

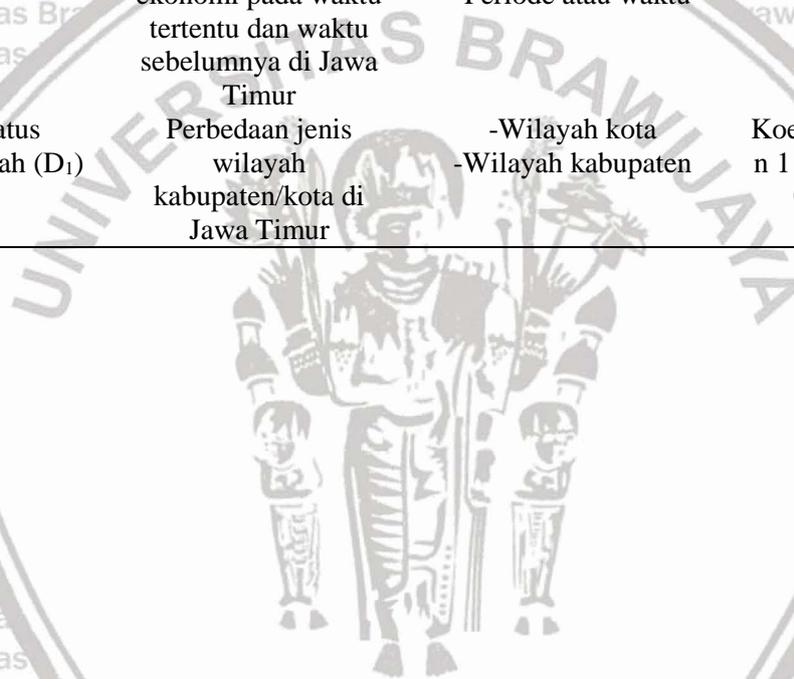
Berikut ini definisi operasional dan pengukuran variabel disajikan secara ringkas pada Tabel 1:

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Penelitian	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Satuan	Skala Ukur
Pertumbuhan penduduk (X_1)	Perubahan jumlah populasi suatu penduduk pada waktu tertentu dan waktu sebelumnya di Jawa Timur	-Jumlah penduduk -Periode atau waktu	Persen	Skala rasio
Indeks Pembangunan Manusia (X_2)	Indikator komposit yang diperoleh dari perbandingan indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran di Jawa Timur	-Indeks pendidikan -Indeks kesehatan -Indeks pengeluaran	Persen	Skala rasio



Variabel Penelitian	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Satuan	Skala Ukur
Persentase penduduk miskin (X_3)	Perbandingan antara penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk di Jawa Timur	-Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan -Jumlah penduduk -Periode atau waktu	Persen	Skala rasio
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X_4)	Perbandingan antara penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja dan jumlah angkatan kerja di Jawa Timur	-Angkatan kerja -Jumlah angkatan kerja -Jumlah penduduk 15 tahun ke atas	Persen	Skala rasio
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Perbandingan perkembangan ekonomi pada waktu tertentu dan waktu sebelumnya di Jawa Timur	-PDRB menurut harga konstan -Periode atau waktu	Persen	Skala rasio
Status Wilayah (D_1)	Perbedaan jenis wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur	-Wilayah kota -Wilayah kabupaten	Koefisien 1 atau 0	Skala nominal



IV. METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dipilih berdasarkan penjelasan pada rumusan masalah. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipilih berdasarkan pengujian hipotesis yang terdapat dalam model. Pengujian hipotesis diperoleh dari hasil uji T, uji koefisien determinasi dan uji F pada setiap variabel yang dianalisis secara bersamaan. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menganalisis signifikan atau tidaknya hasil pengujian suatu model secara statistika.

4.2 Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2021 sampai Juli 2021 dengan lokasi penelitian berada di Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan berupa data sekunder pada Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan Provinsi Jawa Timur termasuk ke dalam wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional tetapi pertumbuhan ekonomi masih mengalami *fluktuasi* selama periode 2016-2018 serta beberapa wilayah kabupaten/kota masih memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.. Pertimbangan lainnya dalam memilih lokasi adalah nilai indeks pembangunan manusia di bawah rata-rata nasional serta tingkat kemiskinan yang masih mengalami *fluktuasi* pada sebagian wilayah.

4.3 Teknik Penentuan Sampel

Variabel yang menjadi batasan dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai variabel (y) atau variabel dependen, sedangkan pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, persentase penduduk miskin, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan status wilayah sebagai variabel (x) atau variabel independen. Sampel dalam penelitian ini berasal dari Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dengan unit sampel berjumlah 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Sampel diambil menggunakan *purposive sampling* karena dianggap sesuai dengan tujuan penelitian dan mewakili populasi yang ada di Provinsi Jawa Timur.

4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang telah disediakan dan peneliti tidak perlu mengumpulkan data penelitian. Data sekunder biasanya bersumber dari publikasi pemerintah, informasi yang dipublikasikan perusahaan, dokumen perpustakaan, buletin statistik, online, dan website (Sekaran, 2011). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. Sumber data sekunder yang dipilih adalah data *cross section*. Data *cross section* adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu. Penelitian ini menggunakan data *cross section* pada tahun 2018 yang dikumpulkan dari sumber dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 2. Sumber Pengumpulan Data Penelitian

Variabel	Jenis data	Sumber data	Jumlah Observasi	Tahun
Pertumbuhan penduduk	Sekunder	BPS Jawa Timur	38 Kabupaten/Kota	2018
IPM	Sekunder	BPS Jawa Timur	38 Kabupaten/Kota	2018
Penduduk Miskin	Sekunder	BPS Jawa Timur	38 Kabupaten/Kota	2018
TPAK	Sekunder	BPS Jawa Timur	38 Kabupaten/Kota	2018
Pertumbuhan Ekonomi	Sekunder	BPS Jawa Timur	38 Kabupaten/Kota	2018

4.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan OLS dengan persamaan regresi linear berganda. Regresi linear berganda bertujuan menunjukkan arah dan besar pengaruh setiap variabel eksogen terhadap variabel endogen. Model regresi linear berganda kemudian dikombinasikan menggunakan *dummy variabel*. Proses analisis data menggunakan aplikasi stata untuk memudahkan proses penghitungan. Adapun formula penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 D_1 + \mu$$

Dimana:

Y = Pertumbuhan Ekonomi

X₁ = Pertumbuhan penduduk

X₂ = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

X₃ = Persentase penduduk miskin

X₄ = Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK)

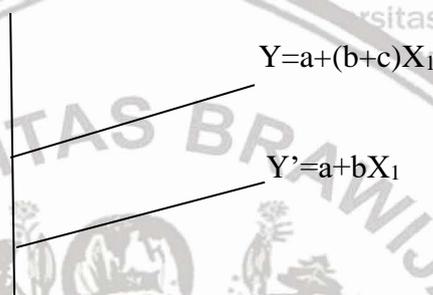
D_1 = Variabel *dummy* jenis wilayah

α = Konstanta

β_1 - β_5 = Koefisien regresi masing-masing variabel

μ = error

Persamaan di atas membentuk model regresi linear berganda dengan variabel *dummy* sebagai variabel independen. Variabel *dummy* digunakan untuk menunjukkan perbedaan pertumbuhan ekonomi pada wilayah kabupaten dan wilayah kota. Model *dummy variable* yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada Gambar 5 sebagai berikut:



Gambar 7. *Dummy* Intersep

Model penelitian regresi linear berganda dengan variabel *dummy* menggunakan metode parameter pendugaan *Ordinary Least Square* (OLS) harus bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased*). Untuk memenuhi persyaratan BLUE (*Best Linear Unbiased*) pada regresi linear berganda dengan *dummy variable* maka dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan dengan menghasilkan persamaan regresi yang baik. Persamaan regresi yang baik ditunjukkan oleh model persamaan yang lulus uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari:

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan menguji residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Apabila uji normalitas dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Nilai probabilitas *chi-square* pada residual model penelitian kurang dari signifikansi ($<0,05$) menunjukkan data terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan melihat ada atau tidaknya hubungan antar variabel independen yang tinggi pada model penelitian. Multikolinearitas seringkali terjadi pada satu atau beberapa variabel independen pada model

pengamatan. Hal ini menyebabkan koefisien regresi kesalahannya menjadi tak terhingga. Kriteria untuk menentukan multikolinearitas adalah dengan melihat VIF. Apabila nilai $VIF > 10$ maka terjadi multikolinearitas, sedangkan nilai $VIF < 10$ menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesamaan varians dari residual pada model regresi. Model regresi yang lolos uji disebut homoskedastisitas dimana terdapat kesamaan varians dari residual pada model penelitian.

4.6 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel eksogen dan variabel endogen. Pengujian hipotesis juga bertujuan mengetahui diterima atau ditolaknya hasil hipotesis nol (H_0) dari variabel pengamatan. Pada penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi. Pengujian variabel dapat menunjukkan sebab akibat hubungan semua variabel yang sedang dilakukan pengamatan. Uji ini meliputi uji koefisien determinasi, uji parsial, dan uji simultan yang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Uji Koefisien Determinasi (R-squared)

Uji determinasi bertujuan mengetahui seberapa besar keragaman dalam variabel independen yang dapat menjelaskan variabel dependen pada suatu model penelitian. Pada penelitian ini dengan menguji koefisien variabel maka dapat diketahui seberapa besar variabel pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia dan presentase penduduk miskin dapat menguraikan variabel pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Semakin nilai koefisien mendekati satu maka semakin besar kemampuan model menjelaskan variasi variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Simultan (Uji F)

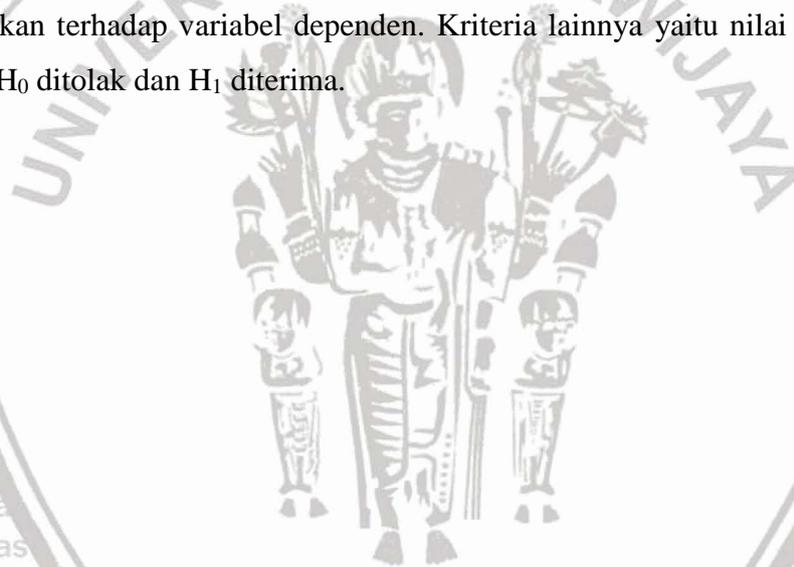
Uji simultan bertujuan mengetahui seberapa besar pengaruh semua variabel regresi dengan serentak. Pada uji simultan dapat diketahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas ($F_{\text{statistik}}$)

$< 0,05$ atau 5% maka variabel pengamatan bersifat signifikan, tetapi jika nilai probabilitas $> 0,05$ atau 5% maka variabel pengamatan dianggap tidak signifikan.

Kriteria pengujian hipotesis juga dilihat berdasarkan $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka hipotesis H_0 diterima dan H_1 ditolak, sedangkan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Ujia Parsial (Uji T)

Ujia Parsial atau disebut juga dengan uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel independe yang sedang dianalisis. Uji Parsial juga menunjukkan hubungan positif dan negatif antar variabel pengamatan. Kriteria yang dapat dijadikan kesimpulan adalah dengan melihat nilai probalitas (t_{hitung}) $< t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak atau variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai probalitas (t_{hitung}) $> t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima atau variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria lainnya yaitu nilai $p\text{-value} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

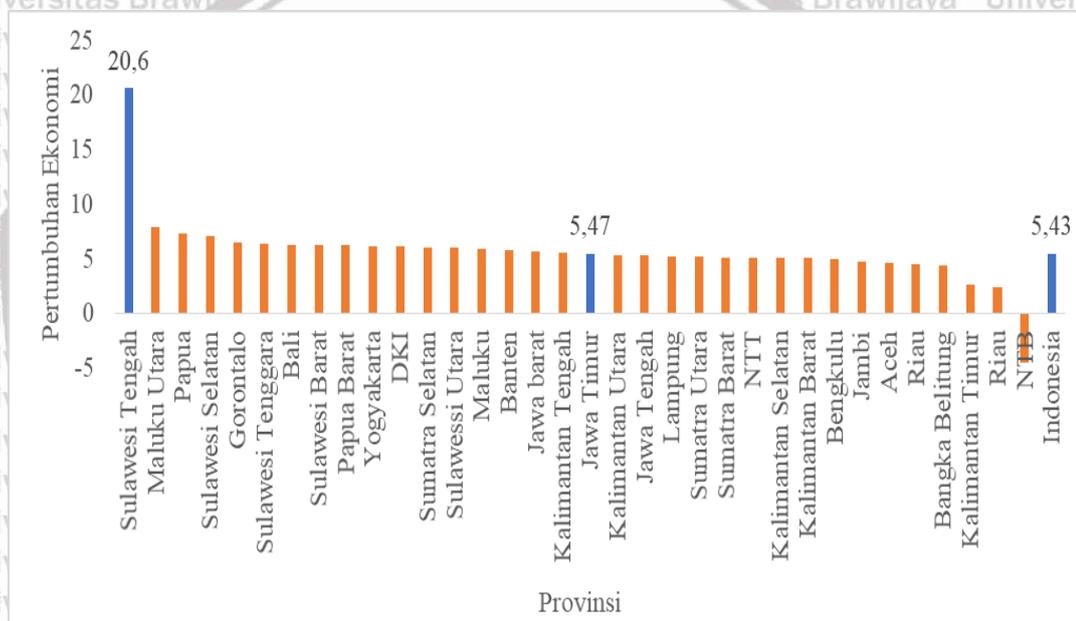


V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum

5.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi nasional maupun regional. Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara atau daerah dalam menyediakan barang dan jasa pada suatu periode tertentu bagi masyarakatnya. Indikator untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur beserta provinsi lain di Indonesia dapat disajikan pada Gambar 8 sebagai berikut:



Sumber : BPS Nasional, 2018

Gambar 8. Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur memiliki nilai di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Provinsi Jawa Timur berkontribusi sebesar 14,53% terhadap perekonomian nasional. Hal ini menempatkan Jawa Timur berada di peringkat 18 besar dengan laju PDRB sebesar 5,47 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi provinsi lainnya. Pertumbuhan ekonomi paling tinggi berada di Provinsi Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 20,6 persen. Pertumbuhan ekonomi regional Jawa Timur dapat dikelompokkan pada Tabel 3 sebagai berikut:

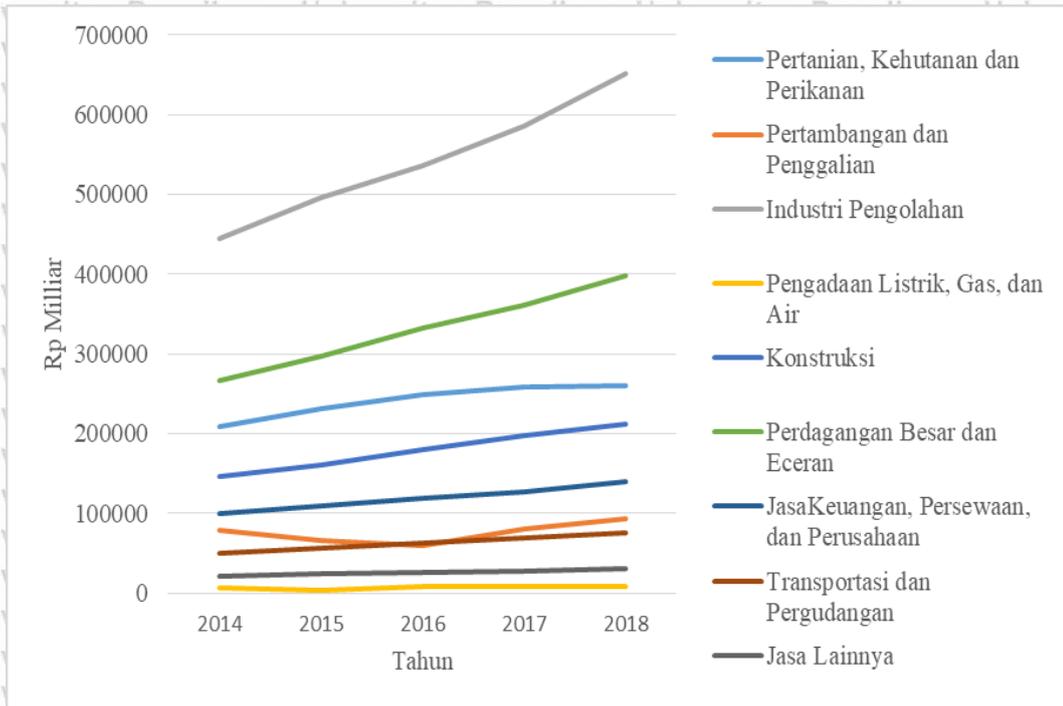
Tabel 3. Kategori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Laju PDRB Atas Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2018 (Persen)

Kabupaten/Kota	Kategori
Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Batu, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan	Tinggi
Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Banyuwangi	
Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri	Rendah

Sumber : BPS data diolah

Tabel 3 menunjukkan pengelompokan pertumbuhan ekonomi pada wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur. Wilayah kabupaten/kota yang termasuk ke dalam kategori tinggi merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, sedangkan daerah dengan kategori rendah merupakan wilayah kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Sopandi (2020) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Madura memiliki laju pertumbuhan yang masih di bawah rata-rata Jawa Timur yaitu Kabupaten Bangkalan memiliki pertumbuhan ekonomi 4,22 persen, kemudian Kabupaten Sumenep 3,63 persen, Kabupaten Sampang 4,56 persen, dan Kabupaten Bangkalan 4,22 persen pada tahun 2018. Kondisi ini disebabkan oleh masih banyaknya penduduk miskin di wilayah tersebut sehingga pola konsumsi masyarakat belum cukup baik.

Gambaran kondisi ekonomi Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dari lingkup makro dihasilkan dari beberapa sektor yang berkembang di Jawa Timur. Sektor-sektor tersebut antara lain: sektor perdagangan, seckor pertanian, sektor pertambangan, sektor kelautan, sektor hotel, seckor restoran, dan sektor industri manufaktur. Berikut Gambar 9 merupakan pendapatan PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan masing-masing sektor:



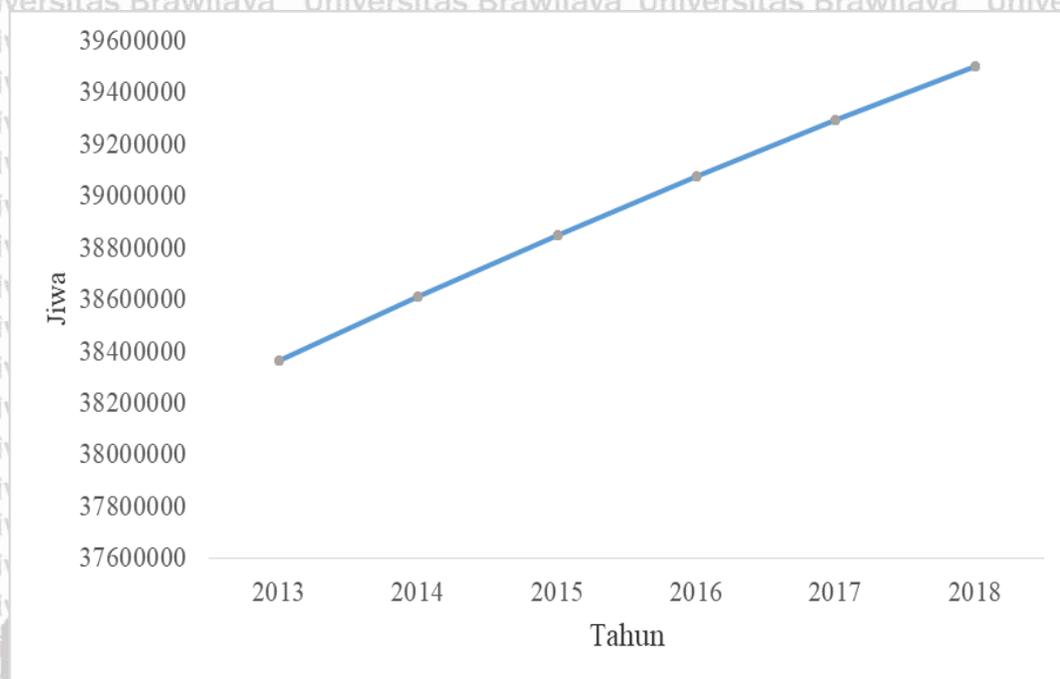
Sumber: BPS data diolah

Gambar 9. PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Milliar rupiah)

Gambar 9 menunjukkan tren pertumbuhan Jawa Timur menurut lapangan usaha. Jawa Timur memiliki tiga sektor unggulan yang mendominasi pertumbuhan ekonomi. Pertama, sektor pertanian masih memberikan kontribusi ekonomi yang tinggi di Jatim, disamping mampu menyerap tenaga kerja yang paling besar (32,5%) dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja di seluruh lapangan usaha di Jawa Timur. Sektor pertanian tahun 2018 memberikan kontribusi besar (10,48 persen) terhadap PDRB di Jawa Timur. Kedua, sektor Industri Pengolahan yang memberi kontribusi pertumbuhan PDRB di Jawa Timur tahun 2018 cukup signifikan dan mampu menyerap tenaga kerja yang banyak (15,88%). Munculnya industri-industri kreatif dalam mendukung industri pengolahan berperan dalam pertumbuhan manufaktur secara keseluruhan. Industri manufaktur merupakan salah satu penopang perekonomian yang dianggap tangguh. Keberadaan dan keberlanjutan industri manufaktur memegang peranan yang kuat karena mengakar di masyarakat. Sektor industri manufaktur, baik industri besar sedang (IBS) maupun industri mikro kecil (IMK) perannya tidak begitu besar dalam pembentukan ekonomi daerah, namun berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Ketiga sektor

perdagangan besar dan eceran dengan struktur ekonomi sebesar 18,57 persen di tahun 2018.

5.1.2 Pertumbuhan Penduduk



Sumber : BPS, 2018

Gambar 10. Jumlah Penduduk Jawa Timur tahun 2013-2018

Pertumbuhan penduduk digambarkan dengan jumlah penduduk yang mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Jawa Timur terus bertambah dari tahun ke tahun sehingga pertumbuhan penduduk di Jawa Timur memiliki pola yang naik atau meningkat. Penduduk ini tersebar di wilayah Jawa Timur dengan karakteristik sosial masyarakat yang beragam. Penduduk Jawa Timur mayoritas didominasi oleh penduduk umur 30-34 tahun dan mayoritas pekerjaan penduduk Jawa Timur sebagai petani. Jumlah penduduk Jawa Timur tahun 2018 sebesar 39.500.851 jiwa menempati posisi kedua terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia sehingga diharapkan mendukung pembangunan ekonomi wilayah Jawa Timur. Jumlah penduduk paling banyak berada di kota Surabaya sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kota Mojokerto.

5.1.3 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia yang bertujuan melihat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.

Nilai IPM dikategorikan dalam empat kategori yaitu: sangat tinggi (>80), tinggi ($70 < IPM < 80$), sedang ($60 < IPM < 70$), dan rendah ($IPM < 60$). Nilai IPM Provinsi Jawa Timur menempati peringkat 15 dibandingkan dengan provinsi di Indonesia lainnya. Nilai ini secara umum menunjukkan pembangunan manusia di Jawa Timur mengalami peningkatan, namun nilai IPM Jawa Timur masih berada di bawah IPM nasional sehingga menyebabkan beberapa wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki nilai IPM yang tidak merata. Pengelompokan pembangunan manusia berdasarkan capaian nilai IPM kabupaten/kota di Jawa Timur dapat ditunjukkan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Kategori IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017

Kabupaten/Kota	Kategori
Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun	Sangat Tinggi
Kabupaten Sidoarjo, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Magetan, Kota Probolinggo, Kabupaten Jombang, kabupaten Tulungagung, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun	Tinggi
Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang,	Sedang

Sumber : BPS Jatim, 2018

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat wilayah kabupaten/kota dikelompokkan ke dalam 3 kategori yaitu IPM sangat tinggi (>80), IPM tinggi ($70 < IPM < 80$), dan IPM sedang ($60 < IPM < 70$). Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Jawa Timur belum merata. Meskipun IPM Jawa Timur secara rata-rata meningkat setiap tahun namun kemajuan masing-masing daerah tidak sama. Pengelompokan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menciptakan karakteristik yang berbeda pada setiap wilayah. Perkembangan pembangunan manusia seringkali dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi secara lebih jelas dapat diuraikan pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Pengelompokan wilayah Jawa Timur Berdasarkan Perkembangan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi periode 2008-2013

Kuadran	Kabupaten/Kota	Keterangan
1.	Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Banyuwangi,	Daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di

Kuadran	Kabupaten/Kota	Keterangan
	Kabupaten Tuban, Kota Probolinggo	atas rata-rata provinsi. (<i>pro-growth, pro-human development</i>)
2.	Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Ponorogo	Daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi namun peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi (<i>low-growth, pro-human development</i>)
3.	Kabupaten Kediri, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, dan Kota Kediri	Daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (<i>low growth, less pro-human development</i>)
4.	Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jember, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Bojonegoro, Kota Malang, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Blitar, Kota Surabaya	Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (<i>high-growth, less-pro human development</i>)

Sumber: BPS Jawa Timur 2018

Berdasarkan Tabel 5ndigambarkan 13% wilayah termasuk ke dalam kuadran 1, 13% wilayah termasuk ke dalam kuadran 2, 60% wilayah termasuk ke dalam kuadran 3, dan 21% wilayah termasuk ke dalam kuadran 4. Hal ini menunjukkan masih belum terdapat wilayah dengan pembangunan manusia lebih dari dan kurang dari rata-rata Jawa Timur. Perbedaan nilai IPM disebabkan oleh kondisi setiap wilayah. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun oleh 3 komponen yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli masyarakat yang memiliki peluang berbeda dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan komponen penyusun IPM tersebut, wilayah Jawa Timur menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat Jawa Timur yang masih didominasi oleh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 74,35% sehingga berpotensi menahan daya saing Jawa Timur dan meningkatkan disparitas kesejahteraan secara spasial (Ludiro, 2019). Tantangan lain berasal dari segi kesehatan yaitu indeks kesehatan masyarakat. Pemerintah baik pusat maupun daerah di Jawa Timur dihadapkan pada persoalan upaya pencegahan *stunting* di Jawa Timur, dimana prevalensi *stunting* masih sangat tinggi yakni 32,5 persen (Risksedas, 2018).

5.1.4 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan masalah mendasar bagi negara berkembang yang mampu mempengaruhi perkembangan ekonomi regional. Kemiskinan menghasilkan penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan.

Penduduk miskin apabila tidak dapat dikendalikan akan menjadi beban pembangunan ekonomi. Menurut Pemprov Jatim (2015), Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi empat kuadran berdasarkan perkembangan jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi. Pembagian wilayah Kabupaten/kota berdasarkan perkembangan jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan pada Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Pengelompokan wilayah Jawa Timur Berdasarkan Perkembangan Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi

Kuadran	Kabupaten/Kota	Keterangan
1.	Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pasuruan	Daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penduduk miskin di atas rata-rata provinsi (<i>pro-growth, pro-poor</i>)
2.	Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jombang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Madiun, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lumajang, Kota Probolinggo	Daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi namun peningkatan penduduk miskin di atas rata-rata provinsi (<i>low-growth, pro-poor</i>)
3.	Kabupaten Pacitan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Magetan, Kabupaten Situbondo, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan	Daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penduduk miskin di bawah rata-rata provinsi (<i>low growth, less pro-poor</i>)
4.	Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kota Blitar, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Malang	Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan penduduk miskin di bawah rata-rata provinsi (<i>high-growth, less pro-poor</i>)

Sumber : BPS Jawa Timur 2015

Berdasarkan Tabel 6 digambarkan 18% wilayah termasuk ke dalam kuadran 1, 28% wilayah termasuk ke dalam kuadran 2, 28% wilayah termasuk ke dalam kuadran 3, dan 23% wilayah termasuk ke dalam kuadran 4. Hal ini menunjukkan masih terjadi ketimpangan penduduk miskin pada wilayah

kabupaten/kota di Jawa Timur. Selama kurun waktu antara Maret 2014 hingga September 2018, rata-rata wilayah Jawa Timur memiliki ketimpangan sebesar 0,38 atau berada dalam kategori ketimpangan sedang. Ketimpangan pendapatan Jawa Timur dapat diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini adalah angka yang menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada suatu daerah dalam periode tertentu. Nilai koefisien gini Jawa Timur pada kategori sedang seiring dengan semakin berkurangnya tingkat kemiskinan di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir hingga tahun 2018. Meningkatnya jumlah tenaga kerja di sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran di daerah tersebut mendorong kenaikan ketimpangan pendapatan. Hal ini mengidentifikasi bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum menikmati hasil dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di daerah.

5.1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Angkatan kerja merupakan penduduk dalam usia kerja baik penduduk yang menganggur maupun penduduk yang bekerja. Jumlah penduduk yang menganggur berdasarkan data BPS Jawa Timur sebagian besar berada di kabupaten/kota besar yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Pasuruan. Wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk yang banyak dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota lainnya. Hal ini disebabkan karena wilayah tersebut tergolong ke dalam daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan penduduk yang padat. Lebih jelasnya data angkatan kerja dapat diuraikan pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Angkatan Kerja Menurut Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2018 (Jiwa)

Tahun	Bekerja	Pengangguran	Total
2015	19.367.777	906.904	20.274.681
2016	19.114.563	839.283	19.953.846
2017	20.099.220	838.496	20.937.716
2018	20.832.201	847.224	21.679.425

Sumber : BPS, berbagai sumber

Kondisi ketenagakerjaan Jawa Timur tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2017. Jumlah angkatan kerja menjadi 21.300 ribu jiwa pada tahun 2018 atau naik sebanyak 1,8 persen dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 20.923 ribu jiwa. Penjelasan tenaga kerja di Jawa Timur dikelompokkan ke dalam TPAK dan TPT pada tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 8. TPAK dan TPT menurut Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2018 (Persen)

Tahun	TPAK	TPT
2015	66,14	4,21
2016	66,16	4,21
2017	68,78	4
2018	69,37	3,99

Sumber : BPS, 2020

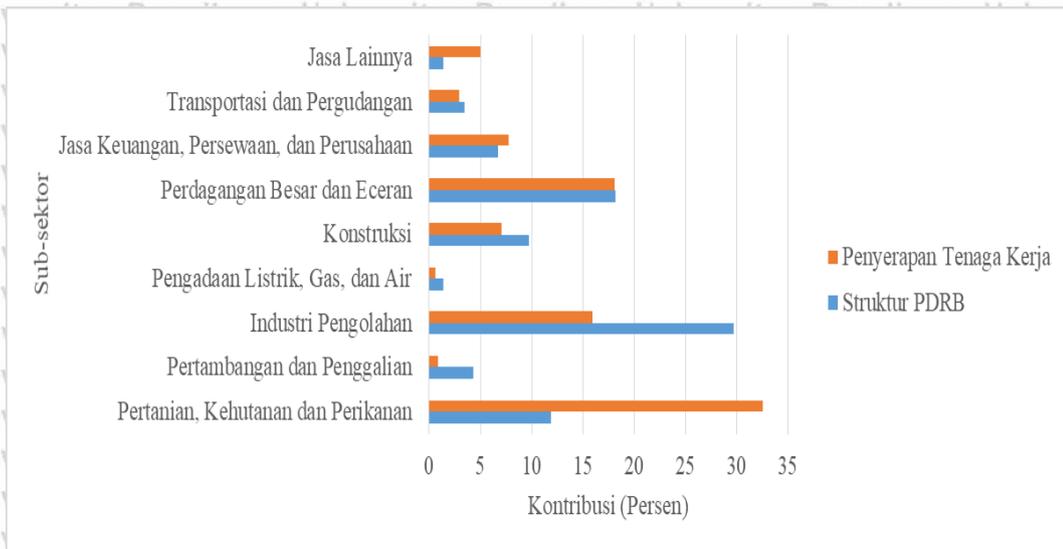
Peningkatan angkatan kerja tentunya akan mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur. Peningkatan angkatan kerja akan menyebabkan pengurangan pada jumlah pengangguran sehingga dapat dijadikan sebagai modal pembangunan.

Penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha industri dan padat teknologi umumnya tidak memberikan kontribusi banyak terhadap penyerapan tenaga kerja.

Keadaan ini disebabkan oleh tenaga manusia yang sudah banyak digantikan oleh tenaga mesin meskipun dalam menjalankan teknologi dibutuhkan sumberdaya manusia. Penyerapan tenaga kerja manusia banyak didominasi oleh lapangan usaha pertanian.

Lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar dalam laju pertumbuhan PDRB namun jumlah penyerapan tenaga kerja tidak sebanding dengan tingginya kontribusi PDRB tersebut. Lapangan usaha ini umumnya terjadi pada industri yang padat teknologi. Hal ini dikarenakan lapangan industri tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak, meskipun tetap membutuhkan sumberdaya manusia dalam menjalankan industri tersebut karena tenaga kerja yang dibutuhkan biasanya memiliki keahlian atau keterampilan tertentu yang dibutuhkan.

Sementara lapangan usaha yang masih didominasi dengan sistem yang tradisional (misal, bidang pertanian) masih sangat besar dalam menyerap tenaga kerja manusia. Penyerapan tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha di Jawa Timur dapat ditunjukkan pada Gambar 11 sebagai berikut:



Sumber : BPS Jatim data diolah

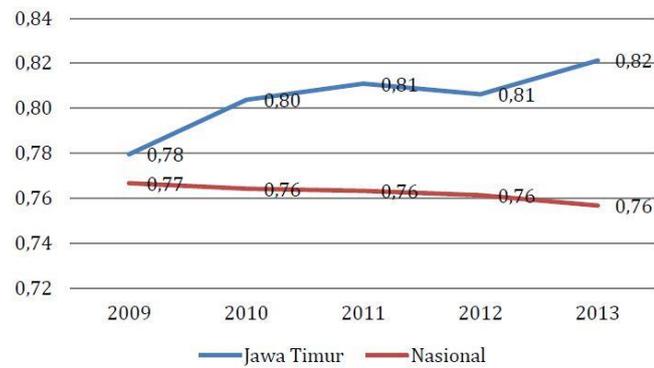
Gambar 11. Perbandingan Struktur PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018

Berdasarkan Gambar 11 dapat dilihat lapangan usaha Industri Pengolahan dengan struktur PDRB sebesar 29,73 persen hanya menyerap tenaga kerja sebanyak 15,88 persen (dari total 20,45 juta jiwa jumlah penduduk bekerja). Contoh lain adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yang memberikan andil PDRB sebesar 5,78 persen, namun hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 0,55 persen. Sedangkan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki struktur PDRB sebesar 10,48 persen mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 32,49 persen. Lapangan usaha Jasa Lainnya yang hanya menyumbangkan PDRB sebesar 1,42 persen mampu menyerap tenaga kerja sebesar 5,03 persen.

5.1.6 Status Wilayah

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang luas di wilayah Pulau Jawa. Jawa Timur terbagi menjadi dua yaitu daratan Jawa Timur dan daratan Pulau Madura. Secara Administratif Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Status wilayah Jawa Timur digolongkan menjadi wilayah kabupaten dan wilayah kota. Wilayah kota kondisi umumnya digunakan sebagai wilayah industri, sedangkan kondisi wilayah kabupaten yang umumnya masih banyak terdapat pedesaan sehingga perkembangan ekonomi berjalan lambat dibandingkan wilayah kota. Sehingga seringkali terjadi kesenjangan ekonomi di

Jawa Timur antara wilayah kota dan kabupaten. Berikut merupakan gambar kesenjangan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2009-2013.



Sumber: BPS Jawa Timur

Gambar 12. Kesenjangan ekonomi Jawa Timur tahun 2009-2013

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa kesenjangan ekonomi di Jawa Timur jumlahnya cukup tinggi, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten dan kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah. Kesenjangan yang ditimbulkan juga relatif besar antar wilayah yang memiliki sumberdaya alam melimpah, yang didukung oleh pengolahan industri dari hulu ke hilir. Kabupaten dan kota di Jawa Timur yang memiliki pendapatan per kapita tinggi yaitu Sidoarjo, Gresik, Kota Madiun, dan Kota Surabaya yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi serta didukung oleh aktivitas industri di daerah ini. Keberadaan industry pengolahan turut meningkatkan pendapatan per kapita bagi masyarakat di daerah tersebut.

5.2 Statistika Deskriptif

Analisis statistika deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan. Tujuan analisis ini untuk memberikan gambaran data dalam variabel yang ditunjukkan nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum dan standar deviasi. Statistika deskriptif memberikan informasi lebih jelas dan mudal pada setiap variabel.

Hasil penelitian analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9. Statistic Descriptive

Variable	Obs	Mean	Std.Dev	Min	Max
Y	38	5.362368	.5732479	3.63	6.5
X ₁	38	.0051994	.0033095	.0002301	.015168
X ₂	38	70.97026	5.208584	.61	81.74
X ₃	38	10.85421	4.44895	3.89	21.21

Variable	Obs	Mean	Std.Dev	Min	Max
X ₄	38	69.69263	3.403892	64.41	79.41
D ₁	38	.7631579	.4308515	0	1

Sumber : Hasil olah data program Stata, 2021

Tabel 9 menunjukkan bahwa jumlah sampel pengamatan atau N setiap variabel adalah 38 data. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai minimum sebesar 3,65 dan nilai maksimum sebesar 6,5 pada tahun 2018. Rata-rata data pertumbuhan ekonomi sebesar 5,36 dengan standar deviasi sebesar 0,57 dari 38 sampel penelitian. Nilai mean (5,36) lebih besar dari standar deviasi (0,57) menandakan penyimpangan data yang terjadi kecil atau data bersifat homogen sehingga penyebaran nilainya merata. Variabel pertumbuhan penduduk memiliki nilai minimum sebesar 0,0002 dan nilai maksimum sebesar 0,0151 pada tahun 2018. Rata-rata data pertumbuhan penduduk sebesar 0,005 dengan standar deviasi sebesar 0,003 dari 38 sampel penelitian. Nilai mean (0,005) lebih besar dari standar deviasi (0,003) menandakan penyimpangan data yang terjadi kecil atau data bersifat homogen sehingga penyebaran nilainya merata.

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai minimum sebesar 61 dan nilai maksimum sebesar 81,74 pada tahun 2018. Rata-rata data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,97 dengan standar deviasi sebesar 5,20 dari 38 sampel penelitian. Nilai mean (70,97) lebih besar dari standar deviasi (5,20) menandakan penyimpangan data yang terjadi kecil atau data bersifat homogen sehingga penyebaran nilainya merata. Variabel persentase penduduk miskin memiliki nilai minimum sebesar 3,89 dan nilai maksimum sebesar 21,21 pada tahun 2018. Rata-rata data persentase penduduk miskin sebesar 10,85 dengan standar deviasi sebesar 4,44 dari 38 sampel penelitian. Nilai mean (10,85) lebih besar dari standar deviasi (4,44) menandakan penyimpangan data yang terjadi kecil atau data bersifat homogen sehingga penyebaran nilainya merata.

Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki nilai minimum sebesar 64,41 dan nilai maksimum sebesar 79,41 pada tahun 2018. Rata-rata data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,69 dengan standar deviasi sebesar 3,40 dari 38 sampel penelitian. Nilai mean (69,69) lebih besar dari standar deviasi (3,40) menandakan penyimpangan data yang terjadi

kecil atau data bersifat homogen sehingga penyebaran nilainya merata. Variabel status wilayah memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1 pada tahun 2018. Rata-rata data status wilayah sebesar 0,76 dengan standar deviasi sebesar 0,43 dari 38 sampel penelitian. Nilai mean (0,76) lebih besar dari standar deviasi (0,43) menandakan penyimpangan data yang terjadi kecil atau data bersifat homogen sehingga penyebaran nilainya merata.

5.3 Uji Asumsi Klasik

5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui model regresi linear berganda dengan dummy memiliki residual yang terdistribusi normal atau tidak. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data yaitu Uji Shapiro Wilk dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Uji Shapiro-Wilk dipilih dengan mempertimbangkan jumlah sampel dalam penelitian yang termasuk sampel kecil sejumlah 38 sampel atau kurang dari 100 sampel. Hasil uji Shapiro-Wilk dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini:

Tabel 10. Shapiro-Wilk W Test

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
res	38	0.96613	1.287	0.529	0.29830

Sumber : Hasil olah data program Stata, 2021

Berdasarkan data Tabel 10 pengujian Shapiro Wilk maka diketahui bahwa residual data terdistribusi normal karena nilai Prob>z sebesar 0,29830 atau lebih besar dari 0,05 sehingga asumsi klasik dapat dipenuhi.

5.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan terikat antar variabel independen pada model penelitian. Nilai yang digunakan dalam uji ini dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan Tolerance (1/VIF).

Kriteria untuk batas nilai VIF yaitu apabila $VIF < 10$ dan $1/VIF > 0,1$ maka menunjukkan model bebas gejala multikolinearitas. Adapun hasil uji multikolinearitas penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11. Multikolinearity Statistic

Variable	VIF	1/VIF
X ₁	1.29	0.774917
X ₂	3.67	0.272152
X ₃	3.12	0.320510
X ₄	1.47	0.678856

Variable	VIF	1/VIF
D ₁	2.29	0.452681
Mean VIF	2.35	

Sumber : Hasil olah data program Stata, 2021

Berdasarkan tabel 14 dapat dilihat nilai VIF untuk semua variabel yaitu pertumbuhan penduduk, IPM, persentase penduduk miskin, TPAK, dan status wilayah menunjukkan nilai VIF kurang dari 10. Selain itu nilai tolerance (1/VIF) untuk semua variabel juga menunjukkan nilai lebih dari 0,1 sehingga menandakan data dalam penelitian tidak mengalami gejala multikolinieritas.

5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui keragaman atau varian pada data apakah membentuk pola tertentu. Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan statistik yaitu Uji Breusch-Pagan. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 12. Breush-Pagan Test

Chi2(1)	2.58
Prob > chi2	0.1079

Sumber : Hasil olah data program Stata, 2021

Berdasarkan Tabel 15 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *chi-square* sebesar 0,1079 (>0,005) sehingga disimpulkan bahwa data bersifat homokedastisitas atau bebas heteroskedastisitas.

5.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Perhitungan statistik analisis regresi linear berganda dengan variabel *dummy* menggunakan bantuan program komputer STATA. Hasil pengolahan data menggunakan STATA selengkapnya dapat ditunjukkan pada Tabel 13 yang diringkas sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Uji Linear Berganda

Y	Coef.	Std.Err.	t	P> t	[95% Conf.	Interval
X ₁	53.34627	18.03402	2.96	0.006	16.61218	90.08037
X ₂	.0209718	.0209718	2.08	0.286	-.0184139	.0603576
X ₃	-.0925727	-.0925727	-4.44	0.000	-.1350627	-.0500827
X ₄	.0411798	.0187337	2.20	0.035	.0030206	0.7933391
D ₁	.0732962	.1812442	0,40	0.689	-.2958861	.4424785
_cons	1.67556	2.122195	0.79	0.436	-2.647209	5.998329

Sumber : Hasil olah data program Stata, 2021

Model persamaan regresi pada Tabel 13 dapat ditulis ke dalam bentuk persamaan regresi berganda sebagai berikut: $Y=1,67556+53,34627X_1$

+0,00209718X₂-0,00925727X₃+0,0411798X₄ +0,0732962D₁. Hasil estimasi model regresi pada penelitian ini dijelaskan oleh nilai koefisien yang menunjukkan pengaruh pertumbuhan penduduk (X₁), indeks pembangunan manusia (X₂), persentase penduduk miskin (X₃), tingkat partisipasi angkatan kerja (X₄), dan status wilayah (D₁) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Jawa Timur. Koefisien regresi dengan parameter negatif ditunjukkan oleh variabel persentase penduduk miskin sedangkan variabel lainnya memiliki koefisien regresi dengan parameter positif. Persamaan regresi berganda menunjukkan nilai konstanta sebesar 1,67556 memiliki arti bahwa jika variabel pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, persentase penduduk miskin, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan status wilayah sama dengan nol maka pertumbuhan ekonomi nilainya sebesar 1,67556.

5.5 Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda dengan variabel *dummy*. Penyelesaian model persamaan dalam penelitian dengan menggunakan bantuan alat analisis berupa STATA. Hasil regresi pengaruh pertumbuhan penduduk, IPM, persentase penduduk miskin, TPAK, dan status wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi kemudian diuji kesesuaian dengan hipotesis penelitian yang sudah dibuat.

5.5.1 Uji F (Uji Signifikansi Stimultan)

Uji statistik F bertujuan mengetahui pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama yang terdapat dalam model penelitian. Uji F dilakukan untuk menguji kesesuaian model regresi yang digunakan dalam penelitian. Hasil uji F penelitian ini lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 14. Hasil F-Test

Number of Obs	38
F(5, 32)	27.41
Prob > F	0.0000
R-squared	0.7312
Adj R-squared	0.6892
Root MSE	0.31959

Sumber : Hasil olah data program Stata, 2021

Berdasarkan uji F *output* Stata pada Tabel 14 diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas

0,05 sehingga model regresi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil pengujian F statistik dapat menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penduduk, IPM, persentase penduduk miskin, TPAK, dan status wilayah secara bersama-sama (stimultan) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga model regresi yang dibangun cukup baik.

5.5.2 Uji Koefisien Determinasi (*R-squared*)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui presentase variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Koefisien hasil uji ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dalam model penelitian. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu. Apabila nilai koefisien determinasi mendekati satu maka variasi variabel independen dalam model semakin mampu menjelaskan model penelitian.

Hasil *output* model koefisien determinasi terlihat pada 14 dengan nilai sebesar 0,7312 yang artinya variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Variabel-variabel independen yaitu jumlah penduduk, IPM, persentase penduduk miskin, TPAK, dan status wilayah memiliki pengaruh sebesar 73,12% terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh sisanya sebesar 27,98% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam model penelitian. Nilai koefisien determinasi mendekati nilai angka 1 atau 100% sehingga model regresi yang dibangun cukup baik.

5.5.3 Uji T (Uji Signifikansi Individual/Parsial)

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individu dalam mempengaruhi variabel dependen. Selain itu uji T untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian. Uji T dinilai dengan melihat nilai probabilitas *value* dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. Berdasarkan hasil *output* Stata Tabel 13 menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penduduk, persentase penduduk miskin, dan TPAK yang dikatakan berpengaruh secara signifikan dengan nilai *p-value* di bawah 0,05 sedangkan variabel IPM dan status wilayah nilai *p-value* di atas 0,05 sehingga tidak berpengaruh secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Variabel pertumbuhan penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan

parameter positif, sedangkan persentase penduduk miskin berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan parameter negatif.

5.6 Pembahasan Hasil Penelitian

5.6.1 Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, berdasarkan uji *t p-value* lebih kecil dari signifikansi yaitu $0,006 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti pertumbuhan penduduk secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien regresi untuk pertumbuhan penduduk sebesar 53,34627 dengan parameter positif. Nilai koefisien ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan 1% pertumbuhan penduduk maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 53,34% dengan asumsi variabel lain konstan.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Rochaida (2016) bahwa pertumbuhan penduduk berasal dari meningkatnya jumlah penduduk yang akan menambah peran sumberdaya manusia untuk terlibat pada kegiatan produksi. Peningkatan kapasitas produksi akan menumbuhkan perekonomian sehingga diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Sukirno (2010) berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu akan menyebabkan luasnya pasar dari barang dan jasa. Pertumbuhan penduduk akan mendorong produksi barang dan jasa nasional maupun regional dari hasil kegiatan ekonomi. Dao (2012) juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa laju pertumbuhan PDB per kapita secara linier bergantung pada pertumbuhan penduduk, tingkat kematian, dan rasio penduduk umur produktif. Guga et al., (2015) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa perkembangan sumberdaya manusia berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memberikan kondisi bagi pembangunan manusia dan pembangunan manusia memberikan peluang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penduduk harus didukung dalam mengembangkan ketrampilan yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan produktivitas lebih besar.

5.6.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan uji T memiliki *p-value* lebih besar dari signifikansi yaitu $0,286 > 0,05$ sehingga H_0 diterima. Variabel IPM secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien regresi variabel IPM sebesar 0,020978 dengan parameter positif.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Asnidar (2018) bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian bertentangan dengan teori Solow yang menyatakan pertumbuhan ekonomi bersumber dari kenaikan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (tenaga kerja). Tenaga kerja mengalami peningkatan apabila angka harapan hidup mereka tinggi. Tingginya angka harapan hidup merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan manusia. Dewi (2017) berpendapat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak ditemukan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh keterbatasan cakupan penelitian yang hanya melihat dalam satu tahun berdasarkan kabupaten/kota.

Hasil penelitian yang tidak signifikan disebabkan oleh komponen IPM yang masih menjadi permasalahan di Jawa Timur sehingga beberapa kabupaten/kota Jawa Timur termasuk ke dalam kategori IPM sedang (60-70). Komponen penyusun IPM meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli. Salah satu permasalahan pada komponen pendidikan yaitu wilayah Jawa Timur yang kualitas penduduknya masih rendah. Hal ini disebabkan Jawa Timur menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat yang masih didominasi oleh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 74,35 persen sehingga menciptakan ketidakseimbangan pembangunan manusia khususnya di daerah Madura masih terdapat penduduk yang buta huruf dan putus sekolah (RPJMD Jatim 2014-2019). Ketidakseimbangan indeks pendidikan di Jawa Timur dikarenakan perbedaan pendidikan di wilayah kota dan desa. Dimana wilayah kota memiliki sistem dan fasilitas pendidikan lebih lengkap dibandingkan wilayah desa.

Penduduk Jawa Timur mayoritas bekerja di sektor pertanian dan informal. Data BPS tahun 2018 menunjukkan penyerapan tenaga kerja sebesar 15,88%

berada pada lapangan usaha industri dan pengolahan, sedangkan penyerapan tenaga kerja sebesar 32,49% berada pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Untuk lapangan usaha informal atau perdagangan besar dan eceran mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 18,08% (Ludiro, 2019). Sektor pertanian yang menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan sektor lainnya belum didukung tenaga kerja yang berkualitas. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengungkapkan bahwa tenaga kerja sektor pertanian didominasi penduduk lansia yang tidak tamat sekolah. Kondisi ini menggambarkan bahwa kualitas tenaga kerja yang belum didukung sumberdaya manusia yang produktif.

Hambatan lainnya juga terjadi pada komponen indeks kesehatan. Hal ini ditunjukkan oleh wilayah Jawa Timur masih mengalami prevalensi *stunting* yang tinggi yakni 32,5 persen (Riskesdas, 2018). Indeks kesehatan akan berpengaruh pada pembangunan manusia dimana masyarakat masih belum bisa mengakses konsumsi pangan yang tersedia. Ramani (2014) berpendapat bahwa penurunan prevelansi malnutrisi di masyarakat akan meningkatkan pembangunan manusia dimana digambarkan oleh pendapatan rumah tangga yang mampu mengakses sumber pangan yang tersedia.

Pendidikan dan kesehatan merupakan komponen pengukuran indeks pembangunan manusia. Permasalahan pendidikan dan kesehatan menunjukkan bahwa masyarakat masih belum mengakses dengan baik komponen pendidikan maupun kesehatan di Jawa Timur sehingga masyarakat belum berkontribusi secara optimal dalam pembangunan ekonomi daerah. Pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting yang harus terpenuhi untuk menciptakan kesejahteraan dalam pembangunan ekonomi.

5.6.3 Pengaruh Persentase Penduduk Miskin terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, berdasarkan uji t nilai *p-value* lebih kecil dari signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti persentase penduduk miskin secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien regresi untuk persentase penduduk miskin sebesar $0,0925727$ dengan parameter negatif. Nilai

koefisien ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan 1% persentase penduduk miskin maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,092% dengan asumsi variabel lain konstan. Hasil yang negatif disebabkan oleh masyarakat Jawa Timur yang mayoritas masih bekerja di bidang pertanian sebagai petani yang memiliki pendapatan rendah sehingga kemiskinan di Jawa Timur masih mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari dan Natha (2016) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Penelitian Suryandarai (2017) menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam tahap awal menyebabkan tingkat kemiskinan cenderung meningkat tetapi memasuki tahap akhir akan menyebabkan pengurangan pada kemiskinan. Kuznet (1954) berpendapat bahwa kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang sangat kuat. Prastyo (2010) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa pengurangan penduduk miskin menjadi syarat penting untuk memenuhi indikator pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pengurangan kemiskinan menandakan pendapatan hasil kegiatan ekonomi telah menyebar pada seluruh masyarakat khususnya penduduk miskin.

5.6.4 Pengaruh Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan nilai *p-value* lebih kecil dari signifikansi yaitu $0,035 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak. Variabel TPAK secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien regresi variabel TPAK sebesar 0,0411798 dengan parameter positif. Nilai koefisien ini berarti bahwa apabila terjadi peningkatan TPAK 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,04% dengan variabel lain konstan.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Mirah et al., (2020) bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung dengan data BPS Jawa Timur (2019) menunjukkan perkembangan TPAK di Jawa Timur yang terus meningkat serta nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga terus bertambah setiap tahunnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa tenaga kerja semakin banyak

terserap dalam lapangan pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja dapat ditunjukkan melalui data BPS, penduduk bekerja tahun 2016 sejumlah 19.114.563 jiwa sedangkan tahun 2017 penduduk yang bekerja sebanyak 20.099.220 jiwa. Pada tahun 2018 penduduk yang bekerja meningkat menjadi 20.832.201 jiwa (BPS, 2019).

Tenaga kerja akan memperoleh pendapatan sehingga masyarakat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dengan memperbaiki pola konsumsi yang lebih baik dari sebelumnya. Mirah, et al., (2020), menemukan dalam penelitiannya bahwa peningkatan jumlah penduduk usia kerja akan menghasilkan pertambahan tenaga kerja. Tenaga kerja yang dibekali dengan ketrampilan atau keahlian mampu menciptakan *output* produksi secara optimal sehingga akan mempengaruhi pendapatan daerah. Rahmawati (2019) berpendapat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja akan mempengaruhi *output* produksi berupa barang dan jasa sehingga menciptakan kenaikan pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam pertumbuhan ekonomi. Pemanfaatan tenaga kerja tersebut juga didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin berkembang sehingga *output* yang dihasilkan semakin beragam. Apabila *output* beragam maka akan menciptakan pasar domestik lebih luas dalam meningkatkan pendapatan suatu wilayah.

5.6.5 Pengaruh Status Wilayah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat status wilayah berdasarkan uji t memiliki nilai *p-value* lebih besar dari signifikansi yaitu 0,689 sehingga H_0 diterima. Variabel Status Wilayah secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien regresi variabel status wilayah sebesar 0,0732962 dengan parameter positif. Variabel status wilayah dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan kecenderungan perbedaan pertumbuhan ekonomi antara wilayah kota dan wilayah kabupaten sebesar 0,073 persen tetapi secara statistik hasilnya tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga dapat dikatakan bahwa wilayah kabupaten dan kota memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang sama misalnya pada wilayah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Tabel 6 menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sidoarjo, dan kabupaten

Gresik memiliki pertumbuhan ekonomi di atas-rata-rata Jawa Timur meskipun termasuk ke dalam wilayah kabupaten.

Hasil penelitian yang tidak signifikan disebabkan oleh perbedaan sumberdaya alam dan perkembangan teknologi yang menimbulkan perbedaan nilai pertumbuhan ekonomi. Perbedaan ketersediaan sumberdaya alam menciptakan karakteristik berbeda pada setiap wilayah. Faktor sumberdaya alam merupakan faktor produksi yang mempengaruhi *output* barang dan jasa. Wilayah yang memiliki sumberdaya alam melimpah didukung tenaga kerja professional dan perkembangan teknologi akan menghasilkan *output* dalam jumlah besar. Kondisi ini ditunjukkan pada nilai pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB harga konstan wilayah Kabupaten Sidoarjo (5,80%), Kabupaten Bojonegoro (10,26%) dan Kabupaten Gresik (5,83%) di atas rata-rata Jawa Timur (5,45%) pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh wilayah Kabupaten Gresik, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sidoarjo wilayah Aglomerasi. Aglomerasi adalah pemusatan berbagai industri ke dalam suatu wilayah sehingga menciptakan pemusatan perekonomian. Syafrizal (2018) meyakini bahwa penyebab Aglomerasi yaitu sumberdaya alam melimpah, kondisi demografis (kependudukan), dan meratanya fasilitas transportasi. Wilayah Bojonegoro dikenal dengan daerah penghasil minyak dimana ketersediaan sumberdaya alam minyak melimpah pada daerah tersebut. Sedangkan wilayah Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah industri yang banyak terdapat perusahaan atau pabrik sehingga terdapat banyak fasilitas transportasi dan jumlah penduduk. Hal ini didukung pernyataan Singalingging (2008), aglomerasi akan menyebabkan efisiensi produksi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu wilayah kabupaten tidak selalu keadaan demografis berupa pedesaan yang mayoritas bekerja sebagai petani sehingga nilai pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Amaliah (2004) yang menyatakan wilayah kota memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi karena wilayah ini memiliki potensi sumberdaya manusia yang melimpah, sedangkan wilayah kabupaten masih banyak terdapat pedesaan yang kualitas sumberdaya manusia secara umum masih belum memiliki ketrampilan atau keahlian khusus. Sumberdaya manusia pada wilayah desa

digambarkan oleh penduduk pedesaan yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. Hal ini menyebabkan perekonomian di wilayah kota berjalan lebih cepat dibandingkan dengan wilayah kabupaten.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penduduk berdasarkan analisis statistik memiliki konstanta positif, memiliki *p-value* yang lebih kecil dari signifikansi sehingga pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan analisis statistik memiliki konstanta positif, memiliki *p-value* yang lebih besar dari signifikansi sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan.
3. Persentase penduduk miskin berdasarkan analisis statistik memiliki konstanta negatif, memiliki *p-value* yang lebih kecil dari signifikansi sehingga persentase penduduk miskin memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan.
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan analisis statistik memiliki konstanta positif, memiliki *p-value* yang lebih kecil dari signifikansi sehingga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan.
5. Status wilayah berdasarkan analisis statistik memiliki konstanta positif, memiliki *p-value* yang lebih besar dari signifikansi. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Variabel status wilayah memiliki kecenderungan perbedaan pertumbuhan ekonomi antara wilayah kota dan wilayah kabupaten sebesar 0,073 persen tetapi secara statistik hasilnya tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan atau pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai IPM Jawa Timur masih belum merata. Sebaiknya wilayah IPM sedang didukung dengan menambah layanan serta fasilitas kesehatan dan pendidikan dengan layanan gratis sehingga masyarakat dapat mengakses pendidikan dengan layak untuk mendorong lebih besar kontribusi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Masyarakat juga dapat mengakses layanan dan fasilitas kesehatan dengan mudah sehingga masalah *stunting* dapat segera ditangani.
2. Persentase penduduk miskin memiliki nilai yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu persentase penduduk miskin periode 2016-2018 sebesar 13,1 persen wilayah kabupaten/kota mengalami *fluktuasi* penduduk miskin. Sebaiknya pemerintah membuka lapangan kerja melalui program UMKM. Program UMKM dapat meningkatkan produksi lokal serta berkontribusi dalam menyumbang pendapatan ekonomi daerah. Penduduk miskin yang terserap ke dalam lapangan pekerjaan atau UMKM mampu menghasilkan pendapatan untuk meningkatkan konsumsi.
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki nilai yang positif dan signifikan menunjukkan angkatan kerja yang tersedia semakin banyak untuk mendorong peningkatan *output* produksi, tetapi angkatan kerja di Jawa Timur masih kekurangan tenaga kerja profesional atau memiliki kualitas rendah yang disebabkan sebanyak 75,34 persen penduduk Jawa Timur merupakan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebaiknya pemerintah membuka pelatihan kerja untuk meningkatkan *soft-skill* angkatan kerja.
4. Saran untuk penelitian yang selanjutnya sebaiknya lebih dikembangkan lagi yakni menambah tahun penelitian selama periode tertentu. Selain itu penelitian dapat dilakukan pada ruang lingkup lebih luas misalnya ruang lingkup nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzal, M., Muhammad, E. M., Ishrat, B. K. S., dan Hina, F. 2012. Relationship among Education, Poverty and Economic Growth in Pakistan : An Econometric Analysis. *Journal of Elementary Education* Vol 22 (2) :23-45.
- Amaliah. I. 2004. Pengaruh Pembangunan Manusia terhadap Kinerja Ekonomi Dati II di Jawa Barat, 1999-2003. *Jurnal* Vol 22 (2) : 213-233.
- Appiah, M., Richard, M., dan Doreen, I.F.,. 2019. Human Development and Its Effect on Economic Growth. *Journal of Bussiness studies* Vol. 12 (2) : 101-110.
- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : UPP STIM YPKN.
- Asnidar. 2018. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi* Vol. 2 (1) : 1-12.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur (Statistics of Jawa Timur Province). 2020. *Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2020*. Malang : BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Statistics of Indonesian). 2019. *Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi 2017-2020*, <http://bps.go.id>. [Diakses 29 Januari 2020].
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Statistics of Indonesian). 2019. *Konsep Garis Kemiskinan*, <http://bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> [Diakses 29 Februari 2020].
- Brata, A.G. 2004. Analisis Hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi daerah Tingkat II di Indonesia. *Lembaga Penelitian-Universitas Atmaja, Yogyakarta*.
- Chendrawan. T., S. 2017. Sejarah Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Tirtayasa Ekonomika* Vol. 12. (1) : 123-146.
- Dao, M.Q 2012. Population ad Economic Growth in Developing Countries. *International Journal of Acdemic Research in Bussiness and Social Sciences*, 2 (1) :6.
- Dewi, N. 2017. Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau. *JOM Feom* Vol. 4 (1) :870-883.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Elsitia dan Barlia, A.,S. 2018. The Correlation of The Human Development Index (HDI) Towards Economic Growth (GDP per Capita) in 10 Asean member Countries. *Journal of Humaintis and Social Studies* Vol. 2 (2) : 40-46.
- Feriyanto. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Prespektif Indoensia*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Guga, K., Alikaj, L., dan Zeneli, F. 2015. Population, Economic Growth and Development in the Emerging Economies. *European Scientif Journal, ESJ*, 11(10).
- Hutagaol, D.T., Tarmizi, dan Murni D. 2019. An Analysis on the Influence of Population Growth Rate, Economic Growth, Human Development Index,

- Income Distribution, and Unemployment Rate toward Poverty in All Provinces in Indonesia. *Internasional Journal of Research and Review* Vol.6 (1) : 100-108.
- Jhingan, M.I. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro, M. 2010. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2013. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Kuznet, S. 1954. Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, 45 (1) : 1-28.
- Lee, N dan Paul, S. 2016. Inclusive growth? The Relationship between Economic Growth and Poverty in British Cities. *Journal of Environment and Planning*.
- Ludiro. 2019. *Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2018*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Keuangan Jawa Timur.
- Made, S.U. 2010. *Statistika Ekonomi dan Bisnis*. Denpasar : Udayana.
- Maharani, A., S. 2017 *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Kalimantan*. Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Mailendra, F. 2009. *Analisis Dampak Pemekaran wilayah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat*. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Malik, M.E., Ishrat, B.K.S., dan Hina, F. 2012. Relationship among Education, Poverty and Economic Growth in Pakistan : An Econometric Analysis. *Journal of Elementari Education*. Vol 22 (1) : 23-45.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Makroekonomi*. Edisi Keenam. Terjemahan oleh Fitria Liza dan Imam Nurmawan. Jakarta : Erlangga.
- Matthus, T. 1978. *An Essay on The Principle of Population*. Electronic Scholarity Publishing Project.
- Mirah, M., R., Paulus, K., dan Ita, P., F., R. 2020. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal* Vol 21 (1) :85-101.
- Mirza, D.S. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Jurnal Pengembangan Ekonomi*. Vol. 1 (3) : 1-13.
- Mohsen, A.S dan Chua, S.Y. 2015. Effect of Trade Openness, Investment and Population on the Economic Growth: A Case Study of Syria. *Hyperion Economic Journal*. Vol 3 (2) : 14-23.
- Mulyadi, S. 2014. *Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan Edisi Revisi ke Lima*. Jakarta : Rajawali Press.
- Nanda, P., N. 2019 *Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan*

- Ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 1998-2018. Skripsi Universitas Jember.
- Nilsen, R. S., 2007. Poverty in America : Consequences for Individuals and The Economy. Journal Paper Presented for United States Government Accountability Office. Amerika Serikat. GAO: 7 (5) : 110-125.
- Nurske, R. 1953. Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. Oxford (UK). Oxford University Press.
- Ogunleye, O.O., Oluwarotimi, A.O., dan Muazu M. 2018. Population Growth and Economic Growth in Nigeria : An Appraisal. Journal of Management, Accounting and Economic Vol. 5 (5) : 282-299.
- Okwori, J., Ajegi, S.O., dan Ochinyabo, S. Abu., 2015. An Empirical Investigation of Malthusian Population Theory in Nigeria. Journal of Emergging Trends in Economics and management Sciences. Vol. 6 (8) : 367-375.
- Prastyo, A., A. 2010. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaen/Kota di Jawa Tengah tahun 2003-2007). Skripsi Universitas Diponegoro.
- Prayitno, B dan Renta, Y. 2020. Pengaruh Tenaga Kerja, IPM, dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota di Jawa Timur tahun 2014-2018. Jurnal Ekonomi Manajemen Akutansi Vol.16 (1) :47-53.
- Purwati, P.D. 2015. Dampak Pertumbuhan dan Stratifikasi Sosial Terhadap Sikap Ekonomi (Studi Deskriptif di Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman). Skripsi Universitas PGRI Yogyakarta.
- Putri, K.,R. 2017. Klasifikasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Indikator Kinerja Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Metode Analisis Cluster. Tugas Akhir Institut Teknologi Sepuluh November.
- Raharjanti, T. 2019. Pengaruh Pengangguran, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017. Skripsi Universitas Sebelas Maret.
- Rahmawati, Y., O. 2019. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Pengeuaran Pemerintahan di Sektor Kesehatan dan Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomidi Indonesia periode 1995-2017. Skripsi Universitas Brawijaya Malang.
- Ramani, A. 2014. Hubungan Kasus Pembangunan Manusia Dengan Indikator Penyakit, Lingkungan, dan Gizi Masyarakat. Jurnal IKESMA Vol. 10 (1) :13-23.
- Rochaida, E. 2016. Dampak Pertumbuhan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonom di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomi Vol, 18 (1) :14-25.
- Rozmar, E., M, Junaidi, dan Bhakti, A. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Partisipasi Angka Kerja, dan Rasio Beban Ketergantungan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 6 (5) : 1-10.

- Rustiadi, E. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Rakyat. Jakarta.
- Salem, T.A. 2018. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja daerah, dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan manusia (IPM) di Provinsi NTT Periode 2001-2016*. Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Sari, N., A. dan Natha, K., S. 2016. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Periode 1999-2013*. *Jurnal Vol 5 (2) : 1384-1407*.
- Sasana, H. 2006. *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah*.
- Shah, T., Sargani, G.R., Ali, A., dan Siraj, W. 2015. *The Effect of Increase in Population on the Economic Growth of Bangladesh*.
- Sharii, MS, Rahim, HA dan Rashid IM. 2013. *Hubungan Antar Penduduk, Energi, Konsumsi, dan Pertumbuhan Ekonomi di Malaysia*. *Jurnal Internasional Ilmu Sosial Vol.13 (1) :39-45*.
- Sharp, Ansel M, dan Charles, A. 1996. *Growth, Inequality, and Poverty: Evidence from Micro Data*. Makalah on the Young Economics Seminar. World Bank.
- Singalingging, A.,J. 2008. *Dampak Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Wilayah*. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Sitepu dan Sinaga. 2005. *Dampak Investasi Sumber Daya Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia : Pendekatan Model Computable General Equilibrium*. (<http://jurnalmanajemen.blogspot.com/2010/dampak-invesntasi-sumberdaya-manusia.html>), Diakses pada 20 Maret 2021.
- Sopandi, D. 2020. *Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2019*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Keuangan Jawa Timur.
- Subri, M. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Prespektif Pembangunan*, edisisatu. PT Grafindo. Jakarta.
- Sukirno, S. 2006. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo persada.
- Sukirno, S. 2010. *Makro Ekonomi*. Raja GrAfindo Persada. Jakarta.
- Sukirno. S. 2012. *Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Keiga*. Jakarta: Rajwali Press.
- Suryandarai, Ai, N. 2017 *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahaun 2004-2014*. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Susanto, A. B dan Lucky, R. 2013. *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamongan*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol. 1 (3) : 1-8*.
- Tarmizi, H.B. 2013. *Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya*. Meda : USU Press.
- Todaro, M.P dan Smith, S.S.C. 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi Sembilan Jilid I*. Jakarta : Erlangga.

Tyas, A., A., W. dan Katryn, T., W. 2015. Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Manusia Untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia. Forum Ilmiah Vol.12 (1) : 1-15.

UNDP. 1990. Human Development Report 1990. Oxford University Press. New York.

Salem, T., A. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Daerah, dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT Periode 2001-2016. Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

World bank. 2006. Definisi Kemiskinan.



Lampiran 1. Data Penelitian Tahun 2018

Nama Kabupaten/Kota	Laju PDRB Harga Konstan menurut tahun 2010 (%)	Pertumbuhan Penduduk (%)	IPM (%)	Presentase Penduduk Miskin (%)	TPAK (%)	Status Wilayah
Kabupaten Pacitan	5,51	0,001817893	67,33	14,19	79,41	1
Kabupaten Ponorogo	5,31	0,000932297	69,91	10,36	72,07	1
Kabupaten Trenggalek	5,03	0,002594127	68,71	12,02	75,19	1
Kabupaten Tulungagung	5,21	0,004365584	71,99	7,27	70,62	1
Kabupaten Blitar	5,1	0,003204187	69,93	9,27	70,61	1
Kabupaten Kediri	5,08	0,004304492	71,07	11,31	67,7	1
Kabupaten Malang	5,56	0,005898868	69,4	10,37	69,7	1
Kabupaten Lumajang	5,02	0,002865484	64,83	9,98	68,1	1
Kabupaten Jember	5,23	0,004332592	65,96	9,98	67,9	1
Kabupaten Banyuwangi	5,84	0,002978384	70,06	7,8	72,12	1
Kabupaten Bondowoso	5,1	0,004402324	65,27	14,39	71,45	1
Kabupaten Situbondo	5,47	0,004861808	66,42	11,82	71,87	1
Kabupaten Probolinggo	4,47	0,005953875	64,85	18,71	68,41	1
Kabupaten Pasuruan	5,79	0,007021087	67,41	9,45	69,59	1
Kabupaten Sidoarjo	6,02	0,015167959	79,5	5,69	64,53	1
Kabupaten Mojokerto	5,89	0,008380142	72,64	10,08	71,92	1
Kabupaten Jombang	5,44	0,004421113	71,86	9,56	69,86	1
Kabupaten Nganjuk	5,39	0,002956715	71,23	12,11	67,91	1
Kabupaten Madiun	5,1	0,002215071	71,01	11,42	69,52	1
Kabupaten Magetan	5,22	0,000501106	72,91	10,31	77,6	1



Nama Kabupaten/Kota	Laju PDRB Harga Konstan menurut tahun 2010 (%)	Pertumbuhan Penduduk (%)	IPM (%)	Present ase Penduduk Miskin (%)	TPAK (%)	Status Wilayah
Kabupaten Ngawi	5,21	0,000230148	69,91	14,83	75,41	1
Kabupaten Bojonegoro	4,4	0,00242864	67,85	13,16	67,13	1
Kabupaten Tuban	5,17	0,004007343	67,43	15,31	71,78	1
Kabupaten Lamongan	5,45	0,000366014	71,97	13,8	68,02	1
Kabupaten Gresik	5,97	0,010899458	75,28	11,89	67,29	1
Kabupaten Bangkalan	4,22	0,008237768	62,87	19,59	68,86	1
Kabupaten Sampang	4,56	0,010894683	61	21,21	67,31	1
Kabupaten Pamekasan	5,46	0,009841206	65,41	14,47	69,35	1
Kabupaten Sumenep	3,63	0,003720852	65,25	20,16	71,53	1
Kota Kediri	5,43	0,005563341	77,58	7,68	65,09	0
Kota Blitar	5,83	0,006971678	77,58	7,44	72,21	0
Kota Malang	5,72	0,005460789	80,89	4,1	65,94	0
Kota Probolinggo	5,94	0,008956645	72,53	7,2	64,89	0
Kota Pasuruan	5,54	0,006990531	74,78	6,77	66,33	0
Kota Mojokerto	5,8	0,007880326	77,14	5,5	69,19	0
Kota Madiun	5,96	0,003395817	80,33	4,49	64,41	0
Kota Surabaya	6,2	0,003776395	81,74	4,88	66,98	0
Kota Batu	6,5	0,008779541	75,04	3,89	70,52	0



Lampiran 2. Hasil Regresi Berganda dengan Variabel *Dummy*

Source	SS	dF	MS	Number of Obs	38
Model	8.9034272	5	1.77806854	F(5, 32)	27.41
Residual	3.26834412	32	.102135754	Prob > F	0.0000
Total	12.1586868	37	.328613158	R-squared	0.7312
				Adj R-squared	0.6892
				Root MSE	0.31959

Y	Coef.	Std.Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval
X ₁	53.34627	18.03402	2.96	0.006	16.61218 90.08037
X ₂	.0209718	.0209718	2.08	0.286	-.0184139 .0603576
X ₃	-.0925727	-.0925727	-4.44	0.000	-.1350627 -.0500827
X ₄	.0411798	.0187337	2.20	0.035	.0030206 .07933391
D ₁	.0732962	.1812442	0,40	0.689	-.2958861 .4424785
_cons	1.67556	2.122195	0.79	0.436	-2.647209 5.998329

Uji Normalitas

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
res	38	0.96613	1.287	0.529	0.29830

Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
X ₁	1.29	0.774917
X ₂	3,67	0.272152
X ₃	3.12	0.320510
X ₄	1.47	0.678856
D ₁	2.29	0.452681
Mean VIF	2.35	

Uji Heteroskedastisitas

Chi2(1)	2.58
Prob > chi2	0.1079

Sumber: Output data sekunder STATA 16.0



Lampiran 3. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2018 (Persen)

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018
Kabupaten Pacitan	5,21	4,98	5,51
Kabupaten Ponorogo	5,29	5,10	5,31
Kabupaten Trenggalek	5,00	5,02	5,03
Kabupaten Tulungagung	5,02	5,08	5,21
Kabupaten Blitar	5,08	5,07	5,1
Kabupaten Kediri	5,02	4,90	5,08
Kabupaten Malang	5,30	5,43	5,56
Kabupaten Lumajang	4,70	5,05	5,02
Kabupaten Jember	5,23	5,11	5,23
Kabupaten Banyuwangi	5,38	5,45	5,84
Kabupaten Bondowoso	4,97	5,03	5,1
Kabupaten Situbondo	5,00	5,07	5,47
Kabupaten Probolinggo	4,77	4,46	4,47
Kabupaten Pasuruan	5,44	5,72	5,79
Kabupaten Sidoarjo	5,51	5,80	6,02
Kabupaten Mojokerto	5,49	5,74	5,89
Kabupaten Jombang	5,40	5,36	5,44
Kabupaten Nganjuk	5,29	5,26	5,39
Kabupaten Madiun	5,27	5,42	5,1
Kabupaten Magetan	5,31	5,09	5,22
Kabupaten Ngawi	5,21	5,07	5,21
Kabupaten Bojonegoro	21,95	10,26	4,4
Kabupaten Tuban	4,90	5,00	5,17
Kabupaten Lamongan	5,86	5,52	5,45
Kabupaten Gresik	5,49	5,83	5,97
Kabupaten Bangkalan	0,66	3,53	4,22
Kabupaten Sampang	6,17	4,69	4,56
Kabupaten Pamekasan	5,35	5,04	5,46
Kabupaten Sumenep	2,58	2,86	3,63
Kota Kediri	5,54	5,14	5,43
Kota Blitar	5,76	5,78	5,83
Kota Malang	5,61	5,69	5,72
Kota Probolinggo	5,88	5,88	5,94
Kota Pasuruan	5,46	5,47	5,54
Kota Mojokerto	5,77	5,65	5,8
Kota Madiun	5,90	5,93	5,96
Kota Surabaya	6,00	6,13	6,2
Kota Batu	5,23	6,56	6,5
Rata-rata	5,57	5,45	5,5

Sumber : BPS Jawa Timur, 2019

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2018 (Persen)

Provinsi	2016	2017	2018
Aceh	3,29	4,18	4,61
Sumatera Utara	5,18	5,12	5,18
Sumatera Barat	5,27	5,30	5,14
Riau	2,18	2,66	2,35
Jambi	4,37	4,60	4,69
Sumatera Selatan	5,04	5,51	6,01
Bengkulu	5,28	4,98	4,97
Lampung	5,14	5,16	5,23
Kep. Bangka Belitung	4,10	4,47	4,45
Kep. Riau	4,98	1,98	4,47
DKI Jakarta	5,87	6,20	6,11
Jawa Barat	5,66	5,33	5,65
Jawa Tengah	5,25	5,26	5,30
DI Yogyakarta	5,05	5,26	6,20
Jawa Timur	5,57	5,46	5,47
Banten	5,28	5,75	5,77
Bali	6,33	5,56	6,31
NTB	5,81	0,09	-4,50
NTT	5,12	5,11	5,11
Kalimantan Barat	5,20	5,17	5,07
Kalimantan Tengah	6,35	6,73	5,61
Kalimantan Selatan	4,40	5,28	5,08
Kalimantan Timur	-0,38	3,13	2,64
Kalimantan Utara	3,55	6,80	5,36
Sulawesi Utara	6,16	6,31	6,00
Sulawesi Tengah	9,94	7,10	20,60
Sulawesi Selatan	7,42	7,21	7,04
Sulawesi Tenggara	6,51	6,76	6,40
Gorontalo	6,52	6,73	6,49
Sulawesi Barat	6,01	6,39	6,26
Maluku	5,73	5,82	5,91
Maluku Utara	5,77	7,67	7,86
Papua Barat	4,52	4,02	6,25
Papua	9,14	4,64	7,32
Indonesia	5,16	5,23	5,43

Sumber: BPS Nasional, 2019

Lampiran 5. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018

Kabupaten/kota	2016	2017	2018
Kabupaten Pacitan	15,49	15,42	14,19
Kabupaten Ponorogo	11,75	11,39	10,36
Kabupaten Trenggalek	13,24	12,96	12,02
Kabupaten Tulungagung	8,23	8,04	7,27
Kabupaten Blitar	9,88	9,80	9,27
Kabupaten Kediri	12,72	12,25	11,31
Kabupaten Malang	11,49	11,04	10,37
Kabupaten Lumajang	11,22	10,87	9,98
Kabupaten Jember	10,97	11,00	9,98
Kabupaten Banyuwangi	8,79	8,64	7,80
Kabupaten Bondowoso	15,00	14,54	14,39
Kabupaten Situbondo	13,34	13,05	11,82
Kabupaten Probolinggo	20,98	20,52	18,71
Kabupaten Pasuruan	10,57	10,34	9,45
Kabupaten Sidoarjo	6,39	6,23	5,69
Kabupaten Mojokerto	10,61	10,19	10,08
Kabupaten Jombang	10,70	10,48	9,56
Kabupaten Nganjuk	12,25	11,98	12,11
Kabupaten Madiun	12,69	12,28	11,42
Kabupaten Magetan	11,03	10,48	10,31
Kabupaten Ngawi	15,27	14,91	14,83
Kabupaten Bojonegoro	14,60	14,34	13,16
Kabupaten Tuban	17,14	16,87	15,31
Kabupaten Lamongan	14,89	14,42	13,80
Kabupaten Gresik	13,19	12,80	11,89
Kabupaten Bangkalan	21,41	21,32	19,59
Kabupaten Sampang	24,11	23,56	21,21
Kabupaten Pamekasan	16,70	16,00	14,47
Kabupaten Sumenep	20,09	19,62	20,16
Kota Kediri	8,40	8,49	7,68
Kota Blitar	7,18	8,03	7,44
Kota Malang	4,33	4,17	4,10
Kota Probolinggo	7,97	7,84	7,20
Kota Pasuruan	7,62	7,53	6,77
Kota Mojokerto	5,73	5,73	5,50
Kota Madiun	5,16	4,94	4,49
Kota Surabaya	5,63	5,39	4,88
Kota Batu	4,48	4,31	3,89
Rata-rata	12,05	11,77	10,98

Sumber : BPS Jawa Timur, 2019

Lampiran 6. Kategori IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017

Wilayah	IPM					Peringkat
	2013	2014	2015	2016	2017	
Kota Surabaya	78,51	78,87	79,47	80,38	81,07	1
Kota Malang	78,44	78,96	80,05	80,46	80,65	2
Kota Madiun	78,41	78,81	79,48	80,01	80,13	3
Kabupaten Sidoarjo	76,39	76,78	77,43	78,17	78,7	4
Kota Kediri	74,18	74,62	75,67	76,33	77,13	5
Kota Blitar	74,53	75,26	76,00	76,71	77,1	6
Kota Mojokerto	74,91	75,04	75,54	76,38	76,77	7
Kabupaten Gresik	72,47	72,84	73,57	74,46	74,84	8
Kota Pasuruan	72,89	73,23	73,78	74,11	74,39	9
Kota Batu	71,55	71,89	72,62	73,57	74,26	10
Kabupaten Magetan	69,86	70,29	71,39	71,94	72,6	11
Kabupaten Mojokerto	69,84	70,22	70,85	71,38	72,36	12
Kota Probolinggo	70,05	70,49	71,01	71,50	72,09	13
Kabupaten Tulungagung	69,30	69,49	70,07	70,82	71,24	14
Kabupaten Lamongan	68,90	69,42	69,84	70,34	71,11	15
Kabupaten Jombang	68,63	69,07	69,59	70,03	70,88	16
Kabupaten Nganjuk	68,98	69,59	69,90	70,50	70,69	17
Kabupaten Kediri	68,01	68,44	68,91	69,87	70,47	18
Kabupaten Madiun	68,07	68,60	69,39	69,67	70,27	19
Kabupaten Banyuwangi	66,74	67,31	68,08	69,00	69,64	20
Kabupaten Blitar	66,49	66,88	68,13	68,88	69,33	21
Kabupaten Ngawi	67,25	67,78	68,32	68,96	69,27	22
Kabupaten Ponorogo	67,03	67,40	68,16	68,93	69,26	23
Kabupaten Malang	65,20	65,59	66,63	67,51	68,47	24
Kabupaten Trenggalek	65,76	66,16	67,25	67,78	68,1	25
Kabupaten Bojonegoro	64,85	65,27	66,17	66,73	67,28	26
Kabupaten Tuban	64,14	64,58	65,52	66,19	66,77	27
Kabupaten Pasuruan	63,74	64,35	65,04	65,71	66,69	28
Kabupaten Pacitan	63,38	63,81	64,92	65,74	66,51	29
Kabupaten Situbondo	63,43	63,91	64,53	65,08	65,68	30
Kabupaten Jember	62,43	62,64	63,04	64,01	64,96	31
Kabupaten Pamekasan	62,27	62,66	63,10	63,98	64,93	32
Kabupaten Bondowoso	63,21	63,43	63,95	64,52	64,75	33
Kabupaten Sumenep	60,84	61,43	62,38	63,42	64,28	34
Kabupaten Probolinggo	62,61	63,04	63,83	64,12	64,28	35
Kabupaten Lumajang	61,87	62,33	63,02	63,74	64,23	36
Kabupaten Bangkalan	60,19	60,71	61,49	62,06	62,3	37
Kabupaten Sampang	56,45	56,98	58,18	59,09	59,9	38
Jawa Timur	67,55	68,14	68,95	69,74	70,27	

Sumber : BPS Jawa Timur, 2018

Lampiran 7. PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018
(Milliar rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	208613,6	230942,5	249453,6	258454,4	260493,9
Pertambangan dan Penggalian	78535,1	66526,2	59900,3	80846,2	93704,2
Industri Pengolahan	445279,8	495751,8	536436,7	586253,6	651126,9
Pengadaan Listrik dan Gas	5612,3	948,5	6204,4	6675,2	6702,1
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1434,5	1573,4	1705,1	1853,1	1949
Konstruksi	145884,6	160496,3	180549,5	197699	212519,5
Perdagangan Besar dan Eceran	266743	297616,2	332190,9	360900,2	398229
Transportasi dan Pergudangan	50000,7	56632,8	62775,4	69176,4	75164,3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	79946,8	91476,3	104938,8	116058,3	126837,9
Real Estat	24123,3	27560,8	29907,4	32080,2	35576,5
Jasa Perusahaan	12177,9	13538,5	14894,1	16255,9	18151
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan JamSosial	35658,5	39137,4	43157,2	45740,7	50581,2
Jasa Pendidikan	41970,8	46006,2	49544,9	52974,1	56824,6
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9682,7	10654,1	11527,5	12611,7	13595,4
Jasa Lainnya	21205,1	24140,2	25827,1	27395,1	29743,1

Sumber: BPS Jawa Timur, 2019

Lampiran 8. Perbandingan Struktur PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018

Lapangan Usaha	Struktur PDRB	Penyerapan Tenaga Kerja
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,90	32,49
Pertambangan dan Penggalian	4,28	0,85
Industri Pengolahan	29,71	15,88
Pengadaan Listrik dan Gas	0,31	0,26
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,09	0,36
Konstruksi	9,71	7,06
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	18,19	18,08
Transportasi dan Pergudangan	3,43	2,93
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,79	6,26
Informasi dan Komunikasi	4,53	0,55
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,71	1,16
Real Estat	1,62	0,18
Jasa Perusahaan	0,83	1,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,31	2,31
Jasa Pendidikan	2,59	4,45
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	1,12
Jasa Lainnya	1,36	5,03

Sumber : BPS Jawa Timur, 2018

